

## BAB 2

### INTERVENSI MILITER DALAM SEJARAH RUSIA

Bab ini merupakan sebuah tinjauan historis terhadap intervensi-intervensi militer terbuka yang terjadi dalam sejarah Rusia. Bagian pertama bab ini akan melihat tiga peristiwa intervensi militer yang dilakukan oleh Uni Soviet yaitu di Hungaria (1956), Cekoslowakia (1968), dan Afghanistan (1979). Bagian kedua akan membahas intervensi militer yang dilakukan Rusia terhadap Georgia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran tentang latar belakang terjadinya intervensi militer di negara-negara tersebut beserta justifikasi atau alasan yang diberikan oleh Uni Soviet maupun Rusia atas tindakannya tersebut.

#### 2.1 Intervensi Militer pada Masa Uni Soviet

Uni Soviet lahir dari reruntuhan Kekaisaran Rusia yang hancur antara lain akibat sistem monarki yang korup serta kekalahan demi kekalahan dalam peperangan melawan Jepang (1904-1905) dan Jerman (1914-1918). Walaupun Jerman beserta sekutu-sekutunya pada akhirnya menyerah kalah pada akhir Perang Dunia I, pada masa antarperang (1919-1939) Uni Soviet berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan *vis-à-vis* negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis. Hal ini terjadi karena 1) kondisi internal Uni Soviet yang lemah akibat perang saudara, kebijakan pertanian kolektif (*kolkhoz*) secara paksa, industrialisasi berat yang dipercepat dan penggunaan teror sebagai instrumen utama untuk menjamin kepatuhan dan kesetiaan rakyat; dan 2) kebijakan luar negeri Uni Soviet yang cenderung bersifat antagonis terhadap negara-negara Barat karena didasari oleh pemikiran Marxisme-Leninisme yang menentang imperialisme dan mendukung revolusi proletariat di seluruh dunia.<sup>47</sup>

Perang Dunia II mengubah segalanya bagi Uni Soviet. Iosif Stalin sebagai pemimpin Uni Soviet berhasil mengubah kelemahan negaranya dan kekalahan-kekalahan awal dari Nazi Jerman menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Tentara Merah (istilah untuk angkatan bersenjata Uni Soviet) memukul mundur

---

<sup>47</sup> Robert H. Donaldson & Joseph L. Noguee, *The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests*, New York: M. E. Sharpe, 1998, h. 41-45.

pasukan Hitler hingga ke Berlin dan menjadi salah satu negara terkuat di dunia pada akhir perang. Dan Uni Soviet praktis menguasai negara-negara di kawasan Eropa Timur dan memasukkannya ke dalam lingkaran pengaruhnya melalui penguasaan partai berhaluan komunis atas pemerintahan negara-negara tersebut. Bagi Stalin, keberadaan rezim-rezim komunis di negara-negara yang loyal kepadanya merupakan jaminan bagi keamanan Uni Soviet.<sup>48</sup> Jaminan tersebut tidak hanya secara fisik berupa *cordon sanitaire* antara Uni Soviet dengan Eropa Barat<sup>49</sup> namun juga secara psikologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Rothschild:

*“...the hegemony of East Central Europe that was achieved through the Soviet Union's immense sufferings and sacrifices, its military prowess, and its diplomatic exertions during World War II for long served as a powerful justification of the Soviet system in the eyes of its own elite and public. That hegemony became the most visible and palpable prize of the great Soviet victory and therefore functioned as a powerful moral bond between the regime and its peoples and among the various sectors of the Soviet elite...it could not be relinquished without jeopardizing that internal Soviet legitimacy for which it was both catalyst and keystone.”*<sup>50</sup>

Keyakinan ini membawa Stalin dan penerus-penerusnya untuk menjaga keamanan dan stabilitas Uni Soviet melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara di bawah pengaruhnya.<sup>51</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan tinjauan terhadap tiga peristiwa intervensi militer yang dilakukan oleh Uni Soviet.

### 2.1.1 Hungaria 1956

Walaupun sebagian besar rakyat Uni Soviet menanggapi kematian Stalin pada bulan Maret 1953, tidak sedikit pula yang berharap bahwa perginya sang diktator akan membawa perubahan pada kehidupan mereka. Kebijakan-kebijakan Stalin mengakibatkan kelaparan, kesengsaraan bagi kaum petani, menurunnya standar hidup dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stalin juga tidak segan

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 57.

<sup>49</sup> Jiri Valenta, “Revolutionary Change, Soviet Intervention, and ‘Normalization’ in East-Central Europe”, *Comparative Politics*, 16:2 (Jan. 1984), h. 128.

<sup>50</sup> Joseph Rothschild & Nancy M. Wingfield, *Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II* (3<sup>rd</sup> ed), New York: Oxford University Press, 2000, h. 73.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 127.

menggunakan teror – yang dilancarkan oleh aparat kepolisian rahasia – untuk membungkam suara-suara kritis maupun oposisi dan menjamin kepatuhan rakyat. Para pengganti Stalin – Georgi Malenkov hingga 1955 lalu digantikan oleh Nikita Krushchev – melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dengan antara lain membatasi kewenangan kepolisian rahasia, mengizinkan kebebasan berekspresi, dan mengurangi pemaksaan kolektivisasi.<sup>52</sup> Puncak dari perubahan ini adalah pidato ‘rahasia’ Krushchev pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet tanggal 25 Februari 1956 yang menghujat Stalin, membeberkan kejahatan-kejahatannya terhadap bangsa dan negara (seperti kegagalan Stalin dalam mengantisipasi serangan Nazi Jerman dan kampanye teror yang mengakibatkan kematian sekitar 1,5 juta orang pada dekade 30-an) dan melarang pengkultusan individu (*cult of personality*) seperti yang dilakukan Stalin.<sup>53</sup> Pidato ini merupakan awal dari proses ‘de-Stalinisasi’ yang tidak hanya mempengaruhi situasi domestik di Uni Soviet namun juga meluas ke wilayah hegemoni Soviet di Eropa Timur. Sebagian besar negara-negara di wilayah tersebut dikuasai oleh pemimpin yang mencontoh Stalin baik dari gaya kepemimpinannya maupun kebijakan-kebijakan yang diambilnya. De-Stalinisasi merupakan ancaman langsung terhadap legitimasi kekuasaan mereka yang memang bertumpu pada patronase sang diktator. Sebagai akibatnya bibit-bibit awal ketidakpuasan rakyat terhadap para ‘Stalin kecil’ mulai muncul dan hal ini menyebabkan benturan antara rakyat di satu sisi yang menginginkan perbaikan pada kehidupan mereka dan penguasa di sisi lain yang ingin mempertahankan *status quo*.

Salah satu negara yang mengalami guncangan hebat akibat benturan ini adalah Hungaria. Sejak 1948 Hungaria berada di bawah kekuasaan absolut partai komunis pimpinan Matyas Rakosi, seorang pengagum Stalin yang loyal dan ambisius. Kebijakan-kebijakan Stalinis yang diterapkan Rakosi menimbulkan ketidakpuasan rakyat atas kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Kematian Stalin dan perubahan kepemimpinan Uni Soviet membuka peluang bagi keresahan publik untuk muncul di permukaan. Kinerja perekonomian yang

---

<sup>52</sup> Robert Service, *A History of Modern Russia: From Nicholas II to Putin*, London: Penguin Books, 2003, h. 332-335.

<sup>53</sup> Nikita S. Krushchev, *Secret Speech Delivered by First Party Secretary at the Twentieth Party Congress of the Communist Party of the Soviet Union*, February 25 1956. <<http://www.fordham.edu/halsall/mod/1956krushchev-secret1.html>> (diakses 27 April 2009).

memburuk dan tekanan dari Moskow memaksa Rakosi untuk mengakhiri monopolinya terhadap kekuasaan dengan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Imre Nagy, seorang komunis moderat yang populer di kalangan petani karena menyuarakan keraguannya terhadap kolektivisasi pertanian yang dilakukan Rakosi pada akhir tahun 40-an.<sup>54</sup> Nagy mencanangkan program perbaikan – dijuluki ‘Arah Baru’ – yang meliputi standar hidup, gaji, dekolktivisasi, investasi untuk pertanian dan industri ringan, usaha privat, desentralisasi administrasi, partisipasi publik, liberalisasi pendidikan, supremasi hukum, amnesti, dan toleransi beragama.<sup>55</sup>

Walaupun program ini disambut baik oleh rakyat Hungaria, Nagy gagal mengembangkannya lebih jauh akibat manuver-manuver Rakosi – yang masih menjadi pemimpin partai komunis – dan jatuhnya Malenkov pada bulan Februari 1955. Malenkov adalah pemimpin Soviet yang paling mendukung Nagy; tidak lama setelah Malenkov jatuh Nagy pun dicopot dari jabatannya sebagai perdana menteri dan bahkan dihentikan keanggotaannya dalam partai komunis.<sup>56</sup>

Namun demikian kemenangan Rakosi tidak bertahan lama; serangan Krushchev terhadap Stalin juga berimbas pada Rakosi. Upaya Rakosi untuk mendiskreditkan Nagy dan Arah Baru-nya ditanggapi dengan sinis oleh para elit partai dan kelompok intelektual; teror dan represi yang terjadi selama kepemimpinan Rakosi – yang antara lain dibebankan oleh para tahanan politik yang dibebaskan dan direhabilitasi – mengubah kesinisan tersebut menjadi kemarahan terbuka. Karena merasa bahwa situasi di Hungaria dapat meningkat hingga tak terkendali, Rakosi dipaksa untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya secara total. Namun Moskow melakukan blunder dalam memilih pengganti Rakosi.<sup>57</sup> Alih-alih menunjuk Nagy – yang lebih memiliki peluang untuk menenangkan dan menyenangkan rakyat – sebagai pemimpin baru, Moskow memilih Erno Gero, seorang politisi yang dianggap terlalu dekat dengan Rakosi. Gero tidak berhasil mengatasi kemarahan dan keresahan publik, dan tidak

---

<sup>54</sup> Rothschild & Wingfield, *op. cit.*, h. 154.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 155.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 157.

lama kemudian peristiwa-peristiwa di luar kendalinya membuat situasi semakin memanas.

Polandia adalah negara blok Timur yang juga mengalami benturan antara rakyat dan penguasa pada saat yang bersamaan. Ketika Uni Soviet mengancam akan melakukan intervensi terhadap pemerintahan 'reformis' Wladyslaw Gomulka, rakyat Hungaria menyatakan simpati dan solidaritas terhadap Polandia – kedua negara merupakan sekutu tradisional sejak Revolusi 1848 melawan kekuasaan Austria di bawah dinasti Habsburg.<sup>58</sup> Dan ketika Moskow membatalkan rencana intervensi serta mengakui Gomulka, sikap tersebut ditanggapi rakyat Hungaria sebagai pertanda bahwa Uni Soviet telah bisa menerima perubahan.

Pada tanggal 23 Oktober 1956, ribuan mahasiswa melakukan unjuk rasa di jalanan kota Budapest menuntut antara lain dikembalikannya Nagy sebagai perdana menteri, hukuman bagi pelaku kejahatan pada masa Rakosi; penarikan mundur pasukan Soviet; kebebasan bicara dan media; restrukturisasi ekonomi; pembebasan tahanan politik; dan diadakannya pemilihan umum yang bebas dan multi-partai.<sup>59</sup> Jumlah pengunjuk rasa semakin besar dengan bergabungnya buruh dan rakyat umum dan tindakan mereka semakin militan; sebuah patung Stalin di pusat kota yang merupakan simbol dari kekuasaan komunis di Hungaria dirobohkan oleh massa.<sup>60</sup> Bentrokan pun tak terelakkan ketika anggota polisi rahasia melepaskan tembakan untuk mengendalikan massa. Massa merebut senjata dari polisi dan tentara – sebagian dari mereka bersimpati dengan para pengunjuk rasa dan bahkan menyerahkan senjata dan amunisinya secara sukarela – dan membalas tembakan. Merasa bahwa situasi semakin lepas kendali, Gero mengumumkan pengangkatan kembali Imre Nagy sebagai perdana menteri dan mengirim pesan kepada Moskow untuk melakukan intervensi dan menyelamatkan pemerintahannya.<sup>61</sup>

Moskow segera menjawab pesan Gero dengan memobilisasi garnisun Soviet yang ditempatkan di Hungaria – sebagai bagian dari kesepakatan Pakta

<sup>58</sup> Johanna Granville, "1956 Reconsidered: Why Hungary and Not Poland?", *The Slavonic and East European Review*, 80:4 (Oct. 2002), h. 666.

<sup>59</sup> Rothschild & Wingfield, *op. cit.*, h. 158.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Warsawa – dan mengirimnya ke Budapest pada keesokan harinya. Subuh tanggal 24 Oktober tank dan infantri Soviet menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengamankan obyek-obyek vital dan mengendalikan massa. Namun mereka tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang gigih dan sengit oleh rakyat yang didukung unit-unit tentara Hungaria yang ‘membelot’ dan bergabung dengan rakyat. Unjuk rasa mahasiswa dan buruh telah berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Pasukan Soviet yang tidak memiliki pengalaman dan perlengkapan untuk menjalankan operasi kota berhasil ditahan dan bahkan dipukul mundur oleh para pemberontak.<sup>62</sup> Intervensi Soviet yang diharapkan dapat menakut-nakuti massa agar menyerah malah semakin menambah kekuatan dan semangat juang pemberontak melawan apa yang dipersepsikan sebagai agresi militer Soviet.<sup>63</sup>

Setelah pertempuran berlangsung beberapa hari dimana kelompok-kelompok pemberontak secara luas unggul baik di ibukota maupun di daerah, Nagy mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 28 Oktober untuk “mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dan menjamin penyelesaian [konflik] secara damai.”<sup>64</sup> Moskow menyetujui gencatan senjata tersebut dan mulai menarik mundur pasukannya dari Budapest pada tanggal 30 Oktober. Kelompok pemberontak menyatakan kemenangannya dan Nagy – dengan dukungan ketua partai baru pengganti Erno Gero yaitu Janos Kadar – berusaha mengembalikan otoritas pemerintah dan memenuhi tuntutan rakyat antara lain dengan menghapus monopoli kekuasaan partai komunis melalui pembentukan kabinet multi-partai.

Karena merasa berada di atas angin, rakyat menuntut perubahan yang lebih cepat dan sistematis. Nagy dan Kadar kemudian berbeda pendapat mengenai langkah yang akan ditempuh selanjutnya, dimana Nagy sepenuhnya mendukung tuntutan revolusi sementara Kadar ingin mencapai kompromi yang dapat diterima oleh Moskow.<sup>65</sup> Walaupun Nagy bersikeras bahwa pemerintahannya tidak akan meninggalkan sosialisme, melakukan perubahan yang drastis atau berseberangan dengan Moskow, pada akhirnya tindakannya berbicara lain. Pada tanggal 1 November, Nagy mengumumkan keluarnya Hungaria dari Pakta Warsawa,

---

<sup>62</sup> Grzegorz Ekiert, *The State Against Society: Political Crises and Their Aftermath in East Central Europe*, New Jersey: Princeton University Press, 1996, h. 63.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 57; terjemahan oleh penulis.

<sup>65</sup> Rothschild & Wingfield, *op. cit.*, h. 159.

mendeklarasikan netralitas Hungaria dan meminta perlindungan dari PBB dan negara-negara Barat.<sup>66</sup> Tindakan Nagy merupakan tamparan di muka bagi Moskow; ia telah melakukan ‘dosa’ yang tak termaafkan. Tiga hari kemudian, pasukan Soviet – yang telah diperkuat oleh kehadiran beberapa divisi dari Ukraina dan Rumania – melancarkan intervensi kedua yang jauh lebih efektif; api revolusi berhasil dipadamkan dalam waktu 24 jam.<sup>67</sup> Nagy beserta para pendukungnya ditangkap dan kemudian dieksekusi, sementara Kadar – yang dipandang lebih pro-Soviet – membangun kembali kekuasaan partai komunis dengan membuang baik elemen ‘revisionis’ (pendukung Nagy) maupun ‘dogmatis’ (pendukung Rakosi) dalam komposisi pemerintahan barunya.<sup>68</sup>

Analisis mengenai intervensi militer Uni Soviet terhadap Hungaria kerap menghubungkan krisis di Budapest dengan krisis di Warsawa. Mengapa Moskow juga tidak melakukan intervensi militer terhadap Polandia? Johanna Granville mengelompokkan analisis-analisis tersebut ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: 1) kelompok yang menyatakan bahwa perbedaannya terletak pada sejarah hubungan antara Rusia/Uni Soviet dengan Hungaria dan Polandia; 2) kelompok yang menekankan perbedaan karakter individual antara pemimpin Hungaria dan pemimpin Polandia dalam menangani krisis di negaranya; dan 3) kelompok yang menyatakan bahwa Hungaria bertindak terlalu jauh dengan keluar dari Pakta Warsawa, mendeklarasikan netralitas dan menerapkan sistem pemerintahan multi-partai.<sup>69</sup>

Granville menyimpulkan bahwa intervensi militer Soviet terhadap Hungaria dapat dijelaskan dari ketiga pandangan ini namun kemudian menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan intervensi militer kedua telah diambil oleh Moskow jauh sebelum deklarasi 1 November yang dilakukan Nagy.<sup>70</sup> Pendapat ini didukung oleh Grzegorz Ekiert yang menuliskan bahwa setelah kegagalan intervensi pertama, Moskow telah mempersiapkan rencana untuk melakukan intervensi kedua secara diam-diam.<sup>71</sup> Pengiriman pasukan tambahan dari Ukraina

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>67</sup> Valenta, *op. cit.*, 135.

<sup>68</sup> Rothschild & Wingfield, *loc. cit.*

<sup>69</sup> Granville, *op. cit.*, h. 656-657.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 681.

<sup>71</sup> Ekiert, *loc. cit.*

dan Rumania dilakukan bersamaan dengan penarikan mundur pasukan yang terlibat intervensi pertama dari Budapest.<sup>72</sup> Keputusan akhir untuk melancarkan intervensi kedua juga dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai kemungkinan terlibatnya Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya dalam membela Hungaria. Dalam hal ini Moskow sangat diuntungkan oleh serangan Inggris-Prancis-Israel terhadap Mesir pada tanggal 29 Oktober menyusul tindakan nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Peristiwa ini menyita perhatian dan tenaga negara-negara Barat serta mengundang reaksi yang keras dari opini dunia sehingga Moskow merasa aman untuk melaksanakan intervensinya tanpa campur tangan asing dan relatif bebas dari kecaman dunia internasional.<sup>73</sup>

Selain dari itu, Jiri Valenta mengemukakan analisisnya yaitu bahwa Moskow memutuskan untuk tidak melakukan intervensi militer terhadap Polandia karena persepsi bahwa Polandia akan lebih sulit ditundukkan dengan kekuatan bersenjata dibandingkan dengan Hungaria.<sup>74</sup> Populasi Polandia lebih besar daripada Hungaria dan aparat keamanan Polandia tidak terpecah-pecah seperti di Hungaria.<sup>75</sup> Valenta juga menyatakan bahwa Gomulka dipandang lebih menguasai situasi ketimbang Nagy; fakta di lapangan menunjukkan bahwa bergabungnya sebagian aparat keamanan ke pihak pemberontak dan aksi-aksi brutal terhadap personil polisi rahasia memberikan kesan telah terjadi anarki di Hungaria.<sup>76</sup> Kedua hal ini tidak terjadi di Polandia sehingga 1) Moskow menganggap bahwa krisis di Polandia tidak akan menyebar ke negara-negara Eropa Timur lainnya dan mengancam hegemoni Uni Soviet di kawasan; dan 2) kontrol Gomulka atas aparat keamanan dan kesediaannya untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan intervensi Soviet cukup efektif untuk membatalkan rencana Moskow.<sup>77</sup> Rothschild menuliskan kesimpulannya mengenai tindakan Uni Soviet menghadapi krisis di Hungaria dan Polandia sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 71.

<sup>74</sup> Valenta, *op. cit.*, h. 133.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 133.

<sup>77</sup> *Ibid.*



*“Comparing the Hungarian Revolution with the almost simultaneous events in Poland taught that, while Stalin's Soviet heirs were indeed prepared to be more flexible than he in permitting considerable domestic autonomy and domestic setting of priorities in the people's democracies, they, too, would not tolerate any dissolution of Communist rule or any unilateral flight out of their hegemonic orbit.”<sup>78</sup>*

### 2.1.2 Cekoslowakia 1968

Di saat Hungaria dan Polandia mengalami krisis akibat de-Stalinisasi, Cekoslowakia justru mempertahankan kepatuhannya terhadap Stalinisme yang dicerminkan oleh ketua partai Antonin Novotny. Pada bulan Januari 1957, Novotny menuduh de-Stalinisasi sebagai sebuah “kelemahan” dan menolak untuk melakukan perubahan apapun terhadap kebijakan negara.<sup>79</sup> Stalinisme di Cekoslowakia berhasil bertahan dari hembusan angin perubahan antara lain karena para elit partai adalah penganut Stalinisme yang tidak ingin mengubah *status quo*. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil – meskipun terkena dampak negatif dari kebijakan-kebijakan Stalinis – tidak menciptakan kondisi yang membuat rakyat merasa kebutuhannya tidak terpenuhi.<sup>80</sup> Kedua hal ini efektif menghalangi timbulnya kritik maupun oposisi terhadap kekuasaan negara.

Namun demikian memasuki dekade 60-an situasi ini mulai berubah. Dalam pidatonya pada Kongres ke-22 Partai Komunis Uni Soviet bulan Oktober 1961, Krushchev mengulang serangannya terhadap Stalin dan selanjutnya menekan Novotny untuk melaksanakan de-Stalinisasi, antara lain melalui rehabilitasi para korban dan tahanan politik. Pada tahun 1962-63 perekonomian Cekoslowakia mulai menunjukkan stagnasi dan bahkan regresi sehingga perlahan-lahan muncul kritik terhadap kelayakan dari kebijakan yang ditempuh Novotny. Kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak merasa kekurangan mulai menyuarakan ketidakpuasannya dan kaum intelektual juga mulai menunjukkan penentangannya terhadap Novotny.<sup>81</sup> Dan anggota partai dari etnis Slowakia yang selama ini merasa didiskriminasikan oleh rekan-rekannya yang

<sup>78</sup> Rothschild & Wingfield, *loc. cit.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 167.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Ekiert, *op. cit.*, h. 130.

beretnis Ceko semakin asertif dalam menuntut hak-haknya.<sup>82</sup> Keseluruhan faktor-faktor ini akhirnya memicu proses ‘de-Stalinisasi yang tertunda’ di Cekoslowakia.<sup>83</sup>

Serupa dengan Hungaria, proses ini memecah partai ke dalam dua kubu yaitu kubu ‘dogmatis’ yang mendukung *status quo* dan kubu ‘reformis’ yang menginginkan perubahan demi perbaikan. Kubu reformis menawarkan program-program ekonomi yang diyakini dapat mengeluarkan negara dari krisis, namun perlawanan kubu dogmatis menyebabkan tidak terlaksananya program-program tersebut sehingga semakin memperburuk krisis. Kubu reformis menyadari bahwa tanpa adanya perubahan politik maka tidak akan terjadi perubahan dalam bentuk apapun; mereka kemudian menggalang kekuatan dan meningkatkan upayanya untuk mengganti Novotny beserta pengikut-pengikut dogmatisnya.<sup>84</sup> Perlahan-lahan kekuatan kubu reformis semakin bertambah dan kritik mereka terhadap Novotny semakin vokal, dan dalam rapat Komite Sentral pada bulan Oktober 1967 kubu reformis secara terbuka meminta agar Novotny mengundurkan diri sebagai ketua partai. Rapat-rapat berikutnya pada bulan Desember dan Januari menjadi ajang perebutan kekuasaan antara kedua kubu. Pada akhirnya kubu reformis keluar sebagai pemenangnya: pada tanggal 5 Januari 1968 Antonin Novotny dicopot dari jabatannya sebagai ketua partai dan digantikan oleh Alexander Dubcek, seorang Slowakia yang sebelumnya menjabat pimpinan partai daerah.

Penunjukan Dubcek senyatanya mengejutkan semua pihak; di luar dari Slowakia, tidak ada yang pernah mendengar namanya sebelum hari itu. Namun Dubcek justru dipilih karena ia adalah figur yang paling bisa diterima baik oleh kedua kubu maupun oleh Moskow.<sup>85</sup> Faktor terakhir ini sangat penting sebab meskipun elit partai menginginkan perubahan untuk memperbaiki situasi dalam negeri, mereka juga belajar dari pengalaman Hungaria yaitu bahwa perubahan yang ekstrem atau tak terkendali dapat mengundang amarah Moskow. Oleh karena itu proses de-Stalinisasi di Cekoslowakia – walaupun tertunda –

<sup>82</sup> Rotshchild & Wingfield, *op. cit.*, h. 168.

<sup>83</sup> Ekiert, *loc. cit.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 133.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 137.

dikendalikan dengan ketat agar tidak keluar dari mekanisme partai dan menciptakan destabilisasi politik yang dapat merusak legitimasi partai di mata rakyat.<sup>86</sup>

Setelah memegang kendali pemerintahan kubu reformis mengeluarkan dokumen dengan judul 'Program Aksi' pada bulan April 1968. Dokumen ini memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan menjadi semacam piagam Magna Carta bagi kepemimpinan Dubcek.<sup>87</sup> Tujuan-tujuan tersebut antara lain meliputi demokrasi dalam partai; otonomi yang lebih besar untuk birokrasi, partai-partai lain dan parlemen; pengembalian hak-hak sipil seperti kebebasan berserikat dan berkumpul; penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan polisi rahasia; pengakuan hak-hak nasional bagi etnis Slowakia dan etnis-etnis minoritas lainnya dalam kerangka federasi; reformasi ekonomi yang komprehensif; dan penghapusan sensor untuk media massa.<sup>88</sup>

Tujuan yang terakhir ini diberlakukan secara resmi pada bulan Juni, dan mulai saat itu reformasi di Cekoslowakia menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan mendapatkan momentum baru. Kritik dan dukungan terhadap pemerintahan Dubcek bermunculan di surat kabar, radio dan televisi. Rakyat Cekoslowakia menjadi sadar akan perubahan yang sedang terjadi di negaranya dan mereka menyambutnya dengan antusias. Meskipun demikian Dubcek tetap melangkah dengan hati-hati; ia menekankan bahwa perubahan yang terjadi samasekali tidak ada muatan anti-komunisme apalagi anti-Soviet, tidak akan mengubah komitmen Cekoslowakia terhadap Pakta Warsawa, dan tidak akan menghasilkan transformasi radikal yang dapat mengancam institusi negara maupun partai.<sup>89</sup> Upaya ini kemudian dijuluki sebagai '*socialism with a human face*', sebuah eksperimen yang dilakukan untuk menciptakan negara sosialis yang lebih manusiawi dan bebas dari ekseseks Stalinisme.<sup>90</sup>

Ironisnya, proses reformasi di Cekoslowakia yang begitu terkendali dan terinternalisasi malah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar bagi Uni Soviet beserta negara-negara Blok Timur lainnya. Mereka khawatir

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 123 & 136.

<sup>87</sup> Valenta, *op. cit.*, h. 131.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Ekiert, *op. cit.*, h. 140.

bahwa keberhasilan reformasi di Cekoslowakia akan menciptakan ‘efek domino’ yang akan menggoyahkan legitimasi sosialisme, mempengaruhi hegemoni Soviet di Eropa Timur dan mengancam kekuasaan para pemimpin partai yang ingin mempertahankan *status quo*.<sup>91</sup> Pada bulan Maret 1968 negara-negara tersebut mengadakan pertemuan untuk menyatakan ketidaksukaannya terhadap perkembangan di Cekoslowakia, dan sejak saat itu Dubcek berada di bawah tekanan yang semakin meningkat.<sup>92</sup> Mereka melontarkan kritik demi kritik terhadap Dubcek dan bahkan mengancam untuk melakukan intervensi militer apabila proses reformasi tidak segera dihentikan.

Pada awal bulan Juli – dengan alasan melakukan latihan bersama dalam kerangka Pakta Warsawa – Uni Soviet beserta Jerman Timur, Polandia, Hungaria dan Bulgaria memobilisasi pasukan di perbatasan Cekoslowakia dan menempatkan sejumlah pasukan di dalam wilayah teritorial Cekoslowakia.<sup>93</sup> Di antara semua kejadian ini Moskow masih berusaha untuk tidak sampai harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan krisis; serangkaian pertemuan di Warsawa, Cierna dan Bratislava pada bulan Juli dan Agustus dilakukan untuk menekan Dubcek agar menghentikan kebijakannya. Namun upaya ini memiliki hasil seperti pada intervensi pertama di Hungaria 12 tahun yang lalu yaitu bahwa tekanan yang meningkat ini – alih-alih menghasilkan kepatuhan atau ketundukan – malah merapatkan barisan kubu reformis, membangkitkan nasionalisme rakyat dan memberikan kekuatan bagi Dubcek untuk menentang Moskow.<sup>94</sup> Dihadapkan pada situasi ini, Moskow akhirnya memutuskan bahwa tidak ada alternatif lain kecuali intervensi militer. Pada malam tanggal 20-21 Agustus, Uni Soviet – bersama-sama dengan sekutu-sekutunya – menginvasi Cekoslowakia dan mengakhiri eksperimen Dubcek untuk menciptakan ‘sosialisme yang manusiawi.’

Melihat kembali peristiwa yang dijuluki *Prague Spring* ini akan menunjukkan adanya pola kesinambungan dalam kebijakan Uni Soviet, terutama bila dikaitkan dengan revolusi di Hungaria. Namun demikian perlu dicatat bahwa sejak 1964 Uni Soviet memiliki pemimpin yang baru yaitu Leonid Brezhnev, dan

---

<sup>91</sup> Rothschild & Wingfield, *op. cit.*, h. 171.

<sup>92</sup> Ekiert, *op. cit.*, h. 142.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 143.

setelah memegang kendali Brezhnev mengumumkan revisi terhadap kebijakan-kebijakan Krushchev yang dianggap kontra-produktif seperti de-Stalinisasi yang berlebihan dan kebijakan luar negeri yang cenderung konfrontatif terhadap negara-negara Barat. Menyikapi krisis di Cekoslowakia, Brezhnev pada awalnya bersikap netral bahkan cenderung mendukung perubahan-perubahan yang terjadi. Pada bulan Desember 1967 Brezhnev melakukan kunjungan ke Praha dan menyatakan tidak akan campur tangan dalam urusan internal partai komunis Cekoslowakia.<sup>95</sup> Brezhnev tidak menghalangi pencopotan Novotny sebagai ketua partai dan tidak pula menolak penunjukan Dubcek sebagai penggantinya.

Meskipun demikian Brezhnev adalah seorang *apparatchik* (aparatur negara) yang loyal terhadap negara dan partai serta memegang teguh prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme. Seiring perjalanan waktu program reformasi di Cekoslowakia semakin dirasakan oleh Brezhnev dan rekan-rekannya di Politburo sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Walaupun demikian Moskow masih ragu-ragu akan langkah yang diambil; keputusan untuk ‘menghukum’ Dubcek melalui intervensi militer mulai dibahas secara serius pada bulan Mei 1968 namun Brezhnev masih meyakini bahwa Dubcek dapat “dikembalikan ke jalan yang benar” tanpa harus menggunakan kekuatan militer.<sup>96</sup> Peristiwa yang mengakhiri kebimbangan Brezhnev adalah penerbitan ‘Manifesto Dua Ribu Kata’ oleh sekelompok intelektual pada bulan Juni yang antara lain menghujat kebijakan-kebijakan Stalinis di masa lalu dan keputusan Komite Sentral Partai Komunis Cekoslowakia pada awal bulan Agustus untuk mengadakan pemilihan anggota partai secara demokratis.<sup>97</sup> Pemerintah diturunkan dan Praha berada di bawah kendali pasukan Pakta Warsawa tanpa perlawanan. Dubcek beserta jajaran kubu reformis ditahan – lalu kemudian diasingkan dari pemerintahan – dan Moskow memasang Gustav Husak sebagai ketua partai pada bulan April 1969.

Sebagaimana dengan yang terjadi di Hungaria, keputusan Uni Soviet untuk mengintervensi Cekoslowakia juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Jiri Valenta mengatakan: “*In the end, the Soviet*

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>96</sup> Valenta, *op. cit.*, h. 136.

<sup>97</sup> Rothschild & Wingfield, *op. cit.*, h. 171-172.

*Politburo concluded that invasion, from a military standpoint, would be a low-risk operation. Dubcek's unwillingness to fight and the clear U.S. noninvolvement noticeably increased the chance of success.*"<sup>98</sup> Saat itu Amerika Serikat sedang terlibat perang di Vietnam dan sedang menghadapi pemilihan presiden yang ketat sehingga tidak berada dalam posisi untuk ikut campur di Cekoslowakia. Meskipun demikian intervensi Soviet kali ini mengundang reaksi yang lebih keras dibandingkan dengan Hungaria terutama – ironisnya – dari dalam blok komunis sendiri. Walaupun Jerman Timur, Polandia, Hungaria dan Bulgaria mendukung – dan membantu – intervensi Uni Soviet, Albania, Rumania dan Yugoslavia menentangnya dengan keras.<sup>99</sup> Reaksi ini muncul tidak hanya dari intervensinya itu sendiri namun juga dari justifikasi dan rasionalisasi intervensi tersebut yang diberikan oleh Moskow. Sebuah artikel dengan judul “Kedaulatan dan Kewajiban-kewajiban Internasional dari Negara-negara Sosialis” yang dimuat di harian *Pravda* tanggal 26 September 1968 mengemukakan argumen sebagai berikut:

*“There is no doubt that the peoples of the socialist countries and the Communist Parties have and must have freedom to determine their country's path of development. However, any decision of theirs must damage neither socialism in their own country nor the fundamental interest of other Socialist countries nor the worldwide workers movement, which is waging a struggle for socialism. This means that every Communist Party is responsible not only to its own people but also to all the socialist countries and to the entire Communist movement. Whoever forgets this in placing sole emphasis on the autonomy and independence of Communist Parties lapses into oneness, shirking his internationalist obligations.”*<sup>100</sup>

Argumen inilah yang di kemudian hari disebut oleh pengamat-pengamat Barat sebagai Doktrin Brezhnev. Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa Uni Soviet sebagai pemimpin blok komunis memiliki *carte blanche* untuk melakukan intervensi – secara militer maupun non-militer – terhadap siapa pun dalam bloknya yang dianggap membahayakan sosialisme ataupun terancam oleh pihak-

<sup>98</sup> Valenta, *op. cit.*, h. 137

<sup>99</sup> Donaldson & Noguee, *Soviet Foreign Policy Since World War II* (4<sup>th</sup> ed.), New York: MacMillan, 1992, h. 271.

<sup>100</sup> Dikutip dalam *ibid.*, h. 270.

pihak yang ingin mengganti sosialisme.<sup>101</sup> Doktrin ini – walaupun tidak diakui sebagai ‘doktrin’ oleh Uni Soviet sendiri – menjadi fondasi dari kebijakan luar negeri Uni Soviet sejak saat itu dan bertahan hingga kepemimpinan Gorbachev pada pertengahan tahun 80-an. Kesimpulan dari intervensi militer terhadap Cekoslowakia ini disampaikan oleh Joseph Rothschild sebagai berikut:

*“It remains to draw a general lesson from the Soviet suppression of the Prague Spring of 1968 comparable with the lessons of 1956 from Poland and Hungary. The lesson seems to have been that, pending profound changes in the Soviet Union itself, a liberalizing “renewal” of sociopolitical life in a neighboring Communist state, even when initiated by a fellow Communist party expressly committed to the [Warsaw Pact], ...to bloc solidarity, and to its own domestic monopoly of power, was, in the final analysis, still unacceptable to the Brezhnevite Soviet leadership, because such a process cocooned the specter of a possible loss of control to social spontaneity and organizational autonomy. That lesson was sobering, but it should not have been surprising.”<sup>102</sup>*

### 2.1.3 Afghanistan 1979

Cekoslowakia menandai terakhir kalinya Uni Soviet melakukan intervensi militer terhadap negara-negara yang berada dalam lingkaran pengaruhnya. Walaupun tidak diakui ataupun diterima, Doktrin Brezhnev berhasil menjamin kestabilan kawasan selama 20 tahun. Bebas dari gangguan-gangguan internal, Uni Soviet di bawah pimpinan Brezhnev mencanangkan kebijakan luar negeri yang memprioritaskan peredaan ketegangan antara blok Timur dan blok Barat. Brezhnev membuka jalur dialog antara Moskow dengan Washington yang lebih intensif dan akomodatif; hasilnya adalah periode ‘damai’ antara kedua blok ini yang lebih dikenal dengan istilah *détente*. Selama periode ini Uni Soviet menahan diri dengan tidak memprovokasi Amerika Serikat maupun Eropa secara langsung, namun hal itu tetap tidak mengurangi upaya Moskow untuk memperkuat pengaruhnya di belahan bumi bagian selatan.

Uni Soviet memiliki sejarah campur tangan yang panjang terhadap konflik-konflik di Amerika Latin, Afrika dan Asia, dan keterlibatan Uni Soviet ini pun pada dasarnya merupakan upaya untuk berebut pengaruh dengan Amerika

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>102</sup> Rothschild & Wingfield, *op. cit.*, h. 173.

Serikat.<sup>103</sup> Oleh karena itu meski berada dalam suasana *détente* Uni Soviet tetap merasa memiliki ‘kewajiban’ untuk mendukung gerakan-gerakan sosialisme di seluruh dunia. Dalam Kongres Ke-25 Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1976 Brezhnev berkata: “*détente does not in the slightest way abolish, and cannot abolish or change the laws of the class struggle. We do not conceal the fact that we see détente as a way to create more favorable conditions for peaceful socialist and communist construction.*”<sup>104</sup> Tiga tahun setelah pidato ini Uni Soviet terlibat dalam konflik di sebuah negara di Asia Selatan yang menjadi awal dari berakhirnya *détente* dan bahkan berakhirnya Uni Soviet itu sendiri. Negara itu bernama Afghanistan.

Keterlibatan Uni Soviet di Afghanistan bukanlah yang pertama kalinya; pada abad ke-19 Kekaisaran Rusia dan Kerajaan Inggris memainkan sebuah ‘Permainan Akbar’ (*The Great Game*) untuk memperebutkan wilayah yang sekarang menjadi Afghanistan. Rusia melakukan ekspansi ke selatan untuk memperoleh akses terhadap pelabuhan yang bebas es di Samudra Hindia sementara Inggris berusaha menghalangi Rusia agar tidak sampai mengancam kedudukannya di India.<sup>105</sup> Permainan Akbar ini berlangsung hingga awal abad ke-20 yaitu ketika Rusia menderita kekalahan dari Jepang dan Jerman lalu kemudian berubah menjadi Uni Soviet dan Inggris tidak mampu lagi mengurus Afghanistan akibat Perang Dunia I dan gerakan nasionalisme di India. Meskipun demikian Uni Soviet tetap memperhatikan tetangganya ini dan kedua negara menjalin hubungan yang sangat baik; Afghanistan adalah negara pertama yang mengakui pemerintahan Bolshevik paska-Revolusi 1917 dan ketika Afghanistan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1919 Uni Soviet adalah negara pertama yang memberi pengakuan.<sup>106</sup> Uni Soviet tetap menganggap Afghanistan sebagai wilayah strategis bagi keamanan Soviet di kawasan Asia Tengah dan Selatan.

Setelah Perang Dunia II Uni Soviet mulai mengirimkan bantuan ekonomi dan militer kepada Afghanistan secara rutin; pada akhir 60-an Uni Soviet menjadi

<sup>103</sup> Donaldson & Noguee, *Soviet Foreign Policy*, h. 163.

<sup>104</sup> Dikutip dalam *ibid.*, h. 185.

<sup>105</sup> Gregory Feifer, *The Great Gamble: The Soviet War in Afghanistan*, New York: HarperCollins, 2009, h. 153.

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 21.



penyedia alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbesar bagi Afghanistan.<sup>107</sup> Pada tahun 70-an bantuan militer semakin ditingkatkan untuk mencegah bergabungnya Afghanistan dengan Iran dan Pakistan yang dipandang sebagai negara-negara Islam konservatif yang pro-Amerika. Hubungan kedua negara ini menjadi semakin dekat ketika terjadi kudeta terhadap Presiden Muhammad Daud pada bulan April 1978. Daud mencoba untuk mengurangi pengaruh Soviet dengan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Iran dan Pakistan. Langkah Daud dihentikan oleh sejumlah perwira dan politisi yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik Afghanistan (*People's Democratic Party of Afghanistan* atau PDPA) yang pro-Soviet. Presiden Nur Muhammad Taraki yang menggantikan Daud beserta sekretaris PDPA Hafizullah Amin – yang kemudian menjadi perdana menteri pada bulan Maret 1979 – mengembalikan Uni Soviet sebagai mitra utama Afghanistan antara lain dengan menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama militer antara kedua negara pada bulan Desember 1978.<sup>108</sup>

Kerjasama ini langsung mendapat ujian pertamanya tidak lama setelah ditandatangani. Pemerintahan Taraki ternyata tidak memperoleh dukungan yang luas dari rakyat Afghanistan. Program modernisasi yang dicanangkan pemerintah menyebabkan keresahan penduduk di daerah pedesaan; Taraki juga tidak segan-segan menggunakan teror untuk memaksa rakyat agar mematuhi kebijakan-kebijakannya.<sup>109</sup> Keresahan rakyat perlahan-lahan diwujudkan dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintah terutama di daerah.<sup>110</sup> Moskow menjadi semakin aktif dalam menghadapi perlawanan ini dengan menambah jumlah personil militernya yang dikirim sebagai penasihat bagi angkatan bersenjata Afghanistan.

Di balik itu ternyata dalam pemerintahan sendiri terdapat persaingan antara Taraki dengan Amin. Setelah menjadi perdana menteri Amin tidak menutup-nutupi ambisinya untuk mengambil alih kepemimpinan dari Taraki. Moskow menilai Amin sebagai sosok yang lebih ekstrem dan brutal daripada Taraki dan berpotensi memperburuk situasi dalam negeri sehingga dapat

<sup>107</sup> Minton F. Goldman, "Soviet Military Intervention in Afghanistan: Roots & Causes", *Polity* 16:3 (Spring, 1984), h. 384.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 387.

<sup>109</sup> Feifer, *op. cit.*, h. 24-25.

<sup>110</sup> Goldman, *op. cit.*, h. 386-387.

mengancam kepentingan Soviet di Afghanistan.<sup>111</sup> Kekhawatiran Moskow akan Amin akhirnya terbukti ketika pada bulan September Amin melakukan kontra-kudeta terhadap Taraki; Taraki ditahan dan kemudian dibunuh di penjara.<sup>112</sup>

Amin memimpin negaranya dengan gaya yang lebih otoriter dan represif dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya. Perlawanan terhadap pemerintah berubah menjadi pemberontakan terbuka dan tentara pemerintah semakin tidak efektif untuk melawannya antara lain akibat ‘pembersihan’ yang dilakukan Amin terhadap elemen-elemen dalam angkatan bersenjata yang dianggap tidak loyal kepadanya.<sup>113</sup> Moskow menyalahkan Amin atas ketidakmampuannya untuk mengatasi pemberontakan rakyatnya; kekhawatiran Moskow adalah apabila kelompok pemberontak berhasil menggulingkan Amin maka Afghanistan akan dikuasai oleh pemerintahan Islam konservatif yang pastinya akan anti-komunis dan anti-Soviet.<sup>114</sup> Laporan penasihat militer Soviet dari Afghanistan menunjukkan situasi yang semakin tidak terkendali sehingga Moskow akhirnya memutuskan untuk melakukan intervensi. Sejumlah unit pasukan elit *spetsnaz* dan satuan infantri lintas udara dikirim ke Afghanistan sebagai persiapan untuk mengamankan operasi penggulingan Amin.

Pada tanggal 12 Desember 1979 Brezhnev bersama sejumlah anggota Politburo lainnya mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas langkah yang akan diambil untuk mengatasi krisis di Afghanistan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah sebuah dokumen yang berisi kesepakatan untuk meng kudeta Amin walaupun tidak secara eksplisit memerintahkan penggunaan kekuatan militer.<sup>115</sup> Keesokan harinya agen-agen KGB di Kabul melaksanakan rencana pembunuhan terhadap Amin; seorang agen yang bekerja sebagai koki di istana kepresidenan mencampur racun ke dalam makanan siang Amin. Unit-unit *spetsnaz* yang sudah disiapkan diberi perintah untuk menyerang dan mengamankan istana kepresidenan setelah mendapat tanda bahwa Amin telah dinetralisir. Namun racun tersebut gagal membunuh maupun melumpuhkan Amin, dan pasukan penyerang diperintahkan untuk kembali ke markas.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 387-388.

<sup>112</sup> Feifer, *op. cit.*, h. 48.

<sup>113</sup> Goldman, *op. cit.*, h. 388.

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 389.

<sup>115</sup> Feifer, *op. cit.*, h. 58.

Kegagalan ini mendorong para penasihat militer di Kabul untuk mengatakan kepada Moskow bahwa untuk menjamin keberhasilan operasi penggulingan Amin dan mengatasi pemberontakan memerlukan tambahan pasukan yang lebih besar.<sup>116</sup> Sementara itu Amin – yang belum menyadari upaya kudeta Soviet terhadap dirinya – mengikuti saran Moskow untuk pindah dari istana kepresidenan dan menetap di istana Taj-Bek di pinggiran kota. Lokasi baru ini ternyata dipilih karena lebih mudah untuk dikuasai ketimbang istana kepresidenan yang terletak di tengah kota Kabul. Pada tanggal 24 Desember Menteri Pertahanan Uni Soviet Dmitry Ustinov menandatangani surat perintah pengiriman pasukan tambahan dengan tujuan “memberikan bantuan internasional kepada Republik Demokratik Afghanistan” dan “mencegah kemungkinan ancaman terhadap Uni Soviet”.<sup>117</sup> Antara tanggal 25 dan 27 Desember divisi kavaleri Soviet memasuki Afghanistan dari Uzbekistan dan Turkmenistan dan pesawat-pesawat tempur serta helikopter Soviet mendarat di pangkalan udara Bagram, sementara pesawat-pesawat angkut Soviet mendarat di Kabul dengan membawa senjata, persediaan logistik dan tambahan pasukan.<sup>118</sup> Amin tetap tidak mencurigai apapun karena menganggap kedatangan pasukan ini sebagai bantuan yang memang diminta dari Moskow.

Pada pagi hari tanggal 27 pasukan Soviet yang terdiri dari unit *spetsnaz* dan infantri lintas udara menyebar ke seluruh penjuru kota Kabul; sebagian menuju istana Taj-Bek untuk menangkap dan membunuh Amin sementara sebagian lagi mengamankan gedung-gedung vital seperti kantor Komite Sentral PDPA; Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri dan Komunikasi; markas besar angkatan bersenjata; gedung dinas intelijen Afghanistan; stasiun radio dan televisi pusat; serta kantor pos pusat dan kantor telegraf pusat.<sup>119</sup> Operasi kali ini – dengan nama kode ‘*Shtorm-333*’ – berhasil mencapai semua tujuannya; pengamanan gedung-gedung vital tersebut mencegah mobilisasi pasukan pro-Amin sementara kelompok yang menyerang istana Taj-Bek berhasil

<sup>116</sup> Aleksandr Liakhovsky, “Inside the Soviet Invasion of Afghanistan and the Seizure of Kabul, December 1979”, *Cold War International History Project Working Paper #51*, January 2007, h. 21.

<sup>117</sup> Feifer, *op. cit.*, h. 64; terjemahan oleh penulis.

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 64-65; lihat juga Liakhovsky, *op. cit.*, h. 44.

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 71-72.

membunuh Amin. Pilihan Moskow sebagai pengganti Amin yaitu Babrak Karmal – seorang anggota PDPA yang moderat yang sebelumnya diasingkan ke Cekoslowakia sebagai duta besar – memasuki Kabul bersamaan dengan konvoi pasukan Soviet pada subuh tanggal 28. Siaran Radio Kabul pada hari itu mengumumkan kematian Amin setelah “diadili sebagai musuh rakyat.”<sup>120</sup>

Intervensi militer Soviet ini adalah yang pertama kalinya dilakukan terhadap negara yang tidak secara langsung berada dalam lingkaran pengaruhnya. Intervensi ini juga yang pertama kalinya Uni Soviet mengalami kesulitan dalam menghadapi perlawanan kelompok pemberontak yang menyebut dirinya *mujahidin*. Keberhasilan *Shtorm-333* membuat Moskow merasa yakin bahwa kekuatan militernya dapat mengatasi *mujahidin* dengan cepat sebagaimana yang terjadi di Hungaria dan Cekoslowakia; namun demikian Moskow mulai menyadari apa yang telah dipahami oleh kakek moyang mereka saat memainkan Permainan Akbar dengan Inggris lebih dari seratus tahun sebelumnya, yaitu bahwa Afghanistan bukanlah medan yang mudah ditaklukkan dan rakyatnya bukanlah rakyat yang mudah tunduk menghadapi penjajah asing. Uni Soviet menjadi terlibat dalam sebuah perang yang tidak berbeda dengan yang dihadapi Amerika Serikat di Vietnam yaitu sebuah perang gerilya melawan musuh yang mengenal dan menguasai medan dengan sangat baik.

Berbeda pula dengan Hungaria dan Cekoslowakia adalah reaksi dunia internasional terhadap intervensi Soviet. Walaupun Afghanistan adalah negara sahabat yang dipimpin oleh seseorang yang berhaluan Marxis, kenyataan bahwa Afghanistan adalah sebuah negara Dunia Ketiga yang terletak di luar hegemoni Soviet di Eropa Timur mencitrakan Uni Soviet sebagai penjajah yang agresif. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila sebagian besar negara-negara di dunia mengecam aksi Soviet ini; sebuah resolusi yang diajukan dalam sidang Majelis Umum PBB pada bulan Januari 1980 menyetujui intervensi yang dilakukan Soviet dengan perolehan suara 108 mendukung dan 18 menolak.<sup>121</sup> Resolusi ini diikuti oleh pernyataan yang dikeluarkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang isinya mengecam intervensi Soviet tersebut.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, h. 81.

<sup>121</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 321.

Reaksi yang paling keras muncul dari negara-negara Barat terutama Amerika Serikat. Presiden AS Jimmy Carter memutuskan untuk menjatuhkan semacam sanksi kepada Uni Soviet melalui pengurangan penjualan gandum; penghentian ekspor barang-barang teknologi tinggi; penundaan pertukaran budaya dan ekonomi; bantuan ekonomi dan militer untuk Pakistan; serta pemboikotan terhadap Olimpiade 1980 yang akan diselenggarakan di Moskow.<sup>122</sup> Dan intervensi Soviet ini mengakhiri periode *détente* dengan Amerika Serikat. Presiden Carter berkata, “*The Soviet Union must realize that its decision to use military force in Afghanistan will be costly to every political and economic it values.*”<sup>123</sup> Kekalahan Jimmy Carter pada pemilihan umum tahun itu menghasilkan seorang presiden Amerika Serikat yang sangat anti-komunis; Ronald Reagan menjuluki Uni Soviet sebagai “*the evil empire*” dan meningkatkan bantuan militer AS kepada *mujahidin* melalui Pakistan.<sup>124</sup> Bantuan AS ini antara lain berupa rudal anti-udara Stinger yang membantu menafikan keunggulan udara yang dimiliki Uni Soviet. Kombinasi senjata modern, medan pertempuran yang berat, taktik gerilya yang efektif dan kegigihan para *mujahidin* menyebabkan pasukan Soviet terperangkap dalam sebuah perang yang tidak tampak ujungnya.

Mengapa Uni Soviet memutuskan untuk melibatkan diri secara penuh di Afghanistan? Minton F. Goldman menyebutkan tiga alasan yaitu 1) keinginan untuk mempertahankan sebuah rezim yang bersahabat dan berhaluan Marxis yang sedang terancam oleh pemberontakan; 2) keinginan untuk memperoleh keunggulan strategis *vis-à-vis* Amerika Serikat dan China di Asia Selatan; dan 3) ketakutan akan efek *spillover* akibat revolusi di Iran yang dapat mempengaruhi stabilitas politik maupun keamanan teritorial republik-republik Soviet di Asia Tengah yang mayoritas berpenduduk Muslim.<sup>125</sup> Pendapat Goldman ini diperkuat oleh laporan yang ditulis oleh Aleksandr Liakhovsky, mantan perwira angkatan darat Uni Soviet yang bertugas di Afghanistan antara 1987-1989 dan menjadi sejarawan terkemuka perang tersebut. Liakhovsky menyatakan bahwa Doktrin Brezhnev masih menuntun para pemimpin di Moskow dalam menjalankan

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 321-322.

<sup>123</sup> Dikutip dalam *ibid.*, h. 322.

<sup>124</sup> Feifer, *op. cit.*, h. 160.

<sup>125</sup> Goldman, *op. cit.*, h. 403.

kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, dari sudut pandang tersebut intervensi militer untuk mempertahankan sosialisme di Afghanistan merupakan langkah yang sangat masuk akal.<sup>126</sup>

Revolusi yang menjatuhkan rezim Shah Reza Pahlevi yang pro-Amerika di Iran juga ditakutkan akan menimbulkan sebuah kebangkitan Islam yang dapat menyebar tidak hanya ke Afghanistan namun juga ke Asia Tengah; bila ini terjadi maka legitimasi dan dominasi partai di wilayah tersebut akan berada di bawah ancaman yang sangat serius.<sup>127</sup> Liakhovsky menambahkan satu faktor lagi yang memainkan peran penting yaitu karakter para pengambil keputusan khususnya Leonid Brezhnev sebagai ketua partai. Brezhnev sangat terpukul atas kematian Taraki sehingga menciptakan dendam pribadi terhadap Amin. Sikap ini kemudian didukung oleh semua anggota Politburo sehingga intervensi militer disepakati sebagai satu-satunya jalan untuk “menghalangi pembentukan rezim teroris Amin, melindungi rakyat Afghanistan dari genosida, mencegah berkuasanya kelompok oposisi dan mempertahankan sekutu ideologis [dari Uni Soviet].”<sup>128</sup>

Namun demikian Brezhnev sendiri tidak sampai menyaksikan akhir dari kesengsaraan dan kehancuran yang ia ciptakan. Brezhnev meninggal dunia pada tanggal 10 November 1982, kurang satu setengah bulan dari peringatan 3 tahun intervensi militer terhadap Afghanistan. Penggantinya adalah mantan ketua KGB Yuri Andropov yang sudah berusia 72 tahun saat dipilih oleh Politburo. Andropov tidak bertahan lama dalam jabatannya karena satu setengah tahun kemudian ia pun meninggal dunia. Kesempatan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan pada saat ini sayangnya diabaikan oleh Politburo dengan penunjukan Konstantin Chernenko sebagai ketua partai. Chernenko juga tidak bertahan lama karena penyakit kronis yang dideritanya, dan setelah kematian Chernenko pada tahun 1985 barulah Politburo menyadari perlunya seorang pemimpin yang (relatif) muda dan penuh energi dan memilih Mikhail Gorbachev sebagai ketua partai yang baru.

Gorbachev menyadari bahwa Uni Soviet tidak akan memperoleh kemenangan di Afghanistan. Dalam pidatonya pada Kongres Ke-27 Partai Komunis Gorbachev menyebut Afghanistan sebagai “luka yang berdarah” bagi

---

<sup>126</sup> Liakhovsky, *op. cit.*, h. 29.

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>128</sup> *Ibid.*; terjemahan oleh penulis.

Uni Soviet<sup>129</sup>; setelah pidato tersebut Gorbachev memulai langkah-langkah untuk mengakhiri keterlibatan Soviet di Afghanistan. Gorbachev juga ingin melakukan pembenahan terhadap apa yang dilihat sebagai stagnasi ekonomi yang akut dan legitimasi pemerintah yang lemah. Untuk itu Gorbachev mengeluarkan pemikiran yang ia sebut *novoe politicheskoe myshlenie* atau pemikiran politik baru. Melalui pemikiran ini Gorbachev menyatakan bahwa reformasi harus dilakukan apabila Uni Soviet ingin tetap bertahan melalui dua konsep yang ia sebut *glasnost* (keterbukaan) dan *perestroika* (restrukturisasi). Di satu sisi Gorbachev meyakini bahwa reformasi adalah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Uni Soviet tetapi di sisi lain Gorbachev juga berpendapat bahwa reformasi bukan berarti penolakan terhadap komunisme dan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme. Namun demikian ironi yang menjangkiti Praha 20 tahun sebelumnya hidup lagi di Moskow: *glasnost* dan *perestroika* menjelma sebagai *les enfants terribles* yang justru menghancurkan kekuatan komunisme di Uni Soviet.

Di awal tahun 1988 Gorbachev mengumumkan keputusan penarikan mundur pasukan Soviet secara bertahap dari Afghanistan. Komitmen Gorbachev untuk tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan pasca-penarikan mundur dipandang sebagai penolakan dari Doktrin Brezhnev.<sup>130</sup> Akibat langsung dari penolakan ini adalah terulangnya revolusi anti-komunis di blok Timur, namun tanpa intervensi dari Moskow tidak ada yang bisa menghalangi keinginan rakyat Eropa Timur untuk mengakhiri kekuasaan partai komunis di negara mereka. Satu per satu rezim komunis di Polandia, Hungaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Bulgaria dan Rumania berguguran dan digantikan oleh pemerintahan non-komunis. Pada tahun 1990 Gorbachev pun mengakhiri monopoli kekuasaan partai komunis di Uni Soviet yang telah berlangsung selama 70 tahun; tindakan ini tidak lain adalah pemutusan hubungan dengan Leninisme dan awal dari akhir bagi Uni Soviet sebagaimana yang dibentuk oleh Revolusi 1917.<sup>131</sup>

Pada bulan Maret 1991 Pakta Warsawa dibubarkan secara resmi setelah sebelumnya ditinggalkan oleh anggota-anggotanya. Disintegrasi Pakta Warsawa

<sup>129</sup> Donaldson & Noguee, *op. cit.*, h. 372.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Service, *op. cit.*, h. 488.

sepertinya mengisyaratkan disintegrasi yang lebih besar yaitu ketika republik-republik di Uni Soviet mulai menyatakan keinginannya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dorongan dari republik-republik ini memaksa Gorbachev – yang semakin kehilangan kekuasaan dan kewenangannya – untuk menyetujui sebuah traktat uni baru yang menetapkan desentralisasi dan otonomi daerah yang seluas-luasnya bagi republik-republik Soviet. Tindakan ini oleh kelompok-kelompok garis keras di pemerintahan dianggap sebagai pengkhianatan terakhir Gorbachev terhadap Uni Soviet. Pada tanggal 18 Agustus 1991 – dua setengah tahun setelah pasukan Soviet terakhir meninggalkan Afghanistan – kelompok ini mencoba melakukan kudeta terhadapnya. Kudeta tersebut berhasil digagalkan, namun peristiwa tersebut akhirnya mempercepat runtuhnya sistem politik Uni Soviet secara total dan bahkan eksistensi Uni Soviet itu sendiri.<sup>132</sup> Uni Soviet sebagai sebuah entitas resmi berakhir pada tanggal 31 Desember 1991; bersamaan itu turut berakhir sebuah ‘perang’ yang berlangsung selama hampir setengah abad dan sebuah rezim yang dianggap sebagai “salah satu rezim paling kejam dalam sejarah manusia.”<sup>133</sup>

## 2.2 Intervensi Militer Rusia terhadap Georgia

Peristiwa intervensi militer Rusia yang dilakukan terhadap Georgia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008 merupakan sebuah peristiwa yang baru dalam arti untuk pertama kalinya Rusia mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di luar wilayah teritorialnya sendiri sejak lepas dari Uni Soviet. Namun demikian di sisi lain peristiwa ini tidak sepenuhnya baru karena konflik antara Rusia dengan Georgia seputar Ossetia Selatan memiliki akarnya pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan Uni Soviet sejak tahun 1920-an. Sub-bab ini akan menganalisis intervensi militer Rusia terhadap Georgia dengan melihat sejarah hubungan kedua negara dan bagaimana Ossetia Selatan menjadi semacam ‘duri dalam daging’ bagi hubungan tersebut.

---

<sup>132</sup> Richard Sakwa, *Russian Politics and Society* (4<sup>th</sup> ed.), London: Routledge, 2008, h. 28.

<sup>133</sup> Dikutip dalam *ibid.*



### 2.2.1 Sejarah Hubungan Rusia-Georgia

Uni Soviet terdiri dari 15 republik yang setelah 1991 menjadi negara-negara yang merdeka dan berdaulat: Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Rusia menyebut ke-14 republik ini dengan istilah *blizhnee zarubezhe* atau *near abroad* yang mengisyaratkan adanya semacam ambiguitas: di satu sisi Rusia mengakui bahwa republik-republik ini telah menjadi negara-negara yang merdeka dan berdaulat namun di sisi lain Rusia merasa bahwa negara-negara ini masih menjadi bagian dari dirinya dan masih bergantung kepadanya dalam suatu hubungan pusat-daerah sebagaimana yang telah berlangsung selama ratusan tahun.<sup>134</sup> Oleh karena itu, walaupun proses disintegrasi Uni Soviet berjalan dengan relatif damai namun sejarah menunjukkan bahwa potensi ancaman justru muncul dari konflik di antara negara-negara penerus (*successor states*) dan dari negara-negara lain yang berusaha memanfaatkan kekosongan kekuasaan.<sup>135</sup>

Salah satu konflik yang terjadi di *near abroad* adalah antara Rusia dengan Georgia. Negara yang terletak di kawasan pegunungan Kaukasus ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1801 dan setelah Revolusi 1917 sempat mengalami periode kemerdekaan yang singkat (1918-1921) sebelum diambil alih oleh pemerintahan Bolshevik dan dijadikan bagian dari Uni Soviet pada tahun 1922, pertama dalam sebuah Republik Federasi Transkaukasia (bersama Armenia dan Azerbaijan) dan setelah 1936 berdiri sendiri sebagai Republik Sosialis Soviet Georgia. Selama di bawah Uni Soviet Georgia memiliki status yang relatif istimewa dibandingkan republik-republik lainnya. Tingkat pendidikan dan standar hidup di Georgia lebih tinggi, dan Georgia juga relatif lebih independen dari Moskow dalam arti merupakan salah satu republik yang mampu mempertahankan identitas dan nasionalismenya sepanjang sejarah Uni Soviet.<sup>136</sup> Status ini diperoleh saat Iosif Stalin menjadi pemimpin Uni Soviet namun lebih merupakan berkah dari naiknya Lavrenty Beria ke dalam lingkaran kekuasaan di Moskow.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 420.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Svante E. Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*, disertasi untuk gelar Ph.D. di Uppsala University, Swedia, 2002, h. 142.

Seperti Stalin, Beria juga berasal dari Georgia dan setelah menjadi ketua Partai Komunis Georgia pada tahun 1931 karirnya terus meningkat hingga diangkat sebagai kepala NKVD pada tahun 1938.<sup>137</sup> Beria memanfaatkan posisinya sebagai salah satu orang terdekat Stalin untuk menjadikan Georgia sebagai basis kekuatannya; hasilnya adalah posisi Georgia yang relatif bebas dari kebijakan-kebijakan represif Soviet seperti kolektivisasi pertanian dan ‘pembersihan’ masyarakat dari elemen-elemen borjuis serta kontra-revolusioner.<sup>138</sup>

Kematian Stalin dan Beria mengubah segalanya bagi Georgia. Pidato ‘rahasia’ Krushchev pada bulan Februari 1956 direaksi dengan negatif oleh rakyat Georgia; reaksi ini timbul akibat pengkultusan individu Stalin yang sangat kuat di Georgia sehingga tindakan Krushchev dianggap sebagai penghinaan terhadap tidak hanya Stalin namun juga seluruh rakyat Georgia.<sup>139</sup> Satu bulan setelah pidato tersebut – bertepatan dengan peringatan tiga tahun kematian Stalin – rakyat Georgia ‘mengenang’ sang pemimpin besar dengan melakukan unjuk rasa anti-Soviet secara besar-besaran di Tbilisi dan kota-kota lainnya. Aksi yang sangat langka dalam sejarah Uni Soviet ini berhasil dikendalikan oleh Moskow dengan cara yang sangat lazim: pasukan anti huru-hara Soviet – yang terdiri dari personil-personil non-Georgia dan diperintahkan untuk menjaga gedung-gedung pemerintahan – melepas tembakan ke arah para pengunjuk rasa dan menyebabkan ratusan korban tewas.<sup>140</sup> Pembantaian ini merupakan titik awal dari kebangkitan nasionalisme Georgia dan menyebabkan rusaknya ikatan emosional Georgia dengan komunisme, Rusia dan Uni Soviet.<sup>141</sup> Salah satu akibat langsung dari peristiwa ini adalah munculnya kelompok-kelompok anti-Rusia yang dipimpin tokoh-tokoh nasionalis seperti Zviad Gamsakhurdia dan Merab Kostava. Gamsakhurdia nantinya akan memainkan peran yang sangat penting dalam proses kemerdekaan Georgia dari Uni Soviet.

---

<sup>137</sup> NKVD adalah singkatan dalam bahasa Rusia yang berarti Komisariat Rakyat untuk Urusan Internal, yaitu kepolisian rahasia pada masa Stalin yang kemudian berubah menjadi KGB (*Komitet Gosudarstvennogo Bezopasnosti* atau Komite Keamanan Negara) setelah kematian Beria.

<sup>138</sup> Cornell, *op. cit.*, h. 145.

<sup>139</sup> Svante E. Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, London: RoutledgeCurzon, 2001, h. 139.

<sup>140</sup> *Ibid.*, h. 140.

<sup>141</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*, h. 147.

Pada tahun 60-an dan 70-an kelompok-kelompok nasionalis ini semakin bertambah jumlahnya dan sentimen-sentimen nasionalis semakin keras didengungkan. Salah satu bentuk sentimen ini ditunjukkan pada bulan April 1978 ketika sekitar 5.000 mahasiswa mengadakan unjuk rasa di Tbilisi untuk memprotes rencana pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi Georgia. Amandemen tersebut hendak menghapus klausula yang menetapkan status bahasa Georgia sebagai satu-satunya bahasa resmi negara dan menggantinya dengan klausula yang menjadikan bahasa Rusia serta bahasa-bahasa republik lainnya sebagai bahasa resmi pula.<sup>142</sup> Menghadapi protes ini pemerintah Georgia yang dipimpin mantan menteri dalam negeri Eduard Shevardnadze memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Tindakan Shevardnadze ini merupakan preseden baru dalam sejarah Uni Soviet dimana sebuah pemerintahan komunis menetapkan kebijakannya berdasarkan opini publik tanpa mengundang reaksi negatif dari Moskow.<sup>143</sup> Shevardnadze tidak hanya dibiarkan oleh Moskow; penunjukannya sebagai kandidat anggota Politburo pada bulan Oktober 1978 dan sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 mengisyaratkan bahwa Shevardnadze memiliki reputasi yang baik di Moskow dan menyiratkan bahwa Georgia masih mempertahankan status istimewanya dibandingkan republik-republik yang lain.

Reformasi yang dicanangkan Gorbachev setelah menjadi pemimpin Uni Soviet menyebabkan meningkatnya dorongan nasionalisme Georgia. Angin perubahan yang berhembus dari Moskow pada awalnya ditanggapi dengan dingin oleh pemerintahan komunis Georgia yang baru pimpinan Jumbar Patiashvili, namun angin tersebut lama kelamaan bertiup semakin kencang sehingga tidak mungkin untuk dibendung. Setelah Moskow memberi jalan untuk demokratisasi pada tahun 1987, aktivis-aktivis nasionalis di Georgia membentuk organisasi-organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Georgia melalui kampanye promosi budaya, bahasa, dan identitas nasional Georgia.<sup>144</sup>

Sepanjang tahun 1988 terjadi perdebatan sengit antara kelompok komunis konservatif yang masih setia kepada Moskow dengan kelompok nasionalis radikal

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 150.

<sup>143</sup> Cornell, *Small Nations*, h. 142.

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 146.

yang mendukung kemerdekaan Georgia. Puncak dari perdebatan ini terjadi pada tanggal 9 April 1989, yaitu ketika ribuan warga yang melakukan unjuk rasa mendukung kemerdekaan Georgia kembali ditangani dengan keras oleh aparat keamanan. Korban tewas tidak sebanyak pada tahun 1956 – ‘hanya’ 19 orang termasuk 16 perempuan – namun kali ini efeknya serupa dengan intervensi militer pertama Soviet di Hungaria: alih-alih mengintimidasi gerakan nasionalisme, tindakan aparat keamanan malah semakin memperkuat oposisi terhadap pemerintah dan menghancurkan legitimasi pemerintahan komunis Georgia.<sup>145</sup> Patiashvili diturunkan dari jabatannya dan penggantinya, Givi Gumbaridze, dipaksa untuk mengakomodasi tuntutan kelompok nasionalis dan mengumumkan kebijakan yang antara lain mengusung kedaulatan Georgia dan supremasi hukum Georgia di atas hukum Soviet.

Namun demikian Gumbaridze pun tidak mampu mengembalikan otoritas partai komunis yang hilang sejak insiden April; pemilihan umum legislatif Georgia yang dilangsungkan pada bulan Oktober 1990 dimenangkan secara mutlak oleh aliansi Meja Bundar untuk Pembebasan Nasional yang dipimpin oleh Zviad Gamsakhurdia, dimana aliansi ini berhasil merebut 155 kursi dari total 250 sementara Partai Komunis hanya berhasil memperoleh 61 kursi.<sup>146</sup> Gamsakhurdia dilantik sebagai ketua parlemen dan setelah itu mencanangkan program persiapan kemerdekaan dan ‘de-Sovietisasi’, antara lain dengan mengubah nama resmi negara menjadi Republik Georgia (tanpa embel-embel Sosialis atau Soviet) dan menolak ikut serta dalam referendum bulan Maret 1991 yang diusulkan Gorbachev untuk membahas traktat uni yang baru demi mempertahankan keutuhan Uni Soviet. Gamsakhurdia malah membalas Gorbachev dengan menggelar referendum internal pada tanggal 9 April – bertepatan dengan peringatan dua tahun insiden di Tbilisi – untuk mengembalikan kemerdekaan Georgia sebagaimana yang dideklarasikan pada tahun 1918. Hasilnya: 98% mendukung kemerdekaan Georgia, dan pada hari yang sama Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet.<sup>147</sup> Pada bulan Mei Gamsakhurdia terpilih sebagai presiden pertama Georgia dengan meraih 86% dari

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, h. 149.

<sup>146</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*, h. 157.

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 165.

total suara yang masuk. Namun demikian kemerdekaan ini belum diakui secara internasional hingga pertengahan tahun 1992 setelah Gamsakhurdia dikudeta oleh lawan-lawan politiknya dan Eduard Shevardnadze diminta untuk memimpin negaranya kembali, kali ini sebagai presiden dari Georgia yang merdeka dan berdaulat.

### 2.2.2 Krisis dan Intervensi di Ossetia Selatan

Intervensi militer yang terjadi pada bulan Agustus 2008 yang lalu memiliki akarnya pada kejadian-kejadian yang menimpa Ossetia Selatan tidak lama setelah kelompok Bolshevik menggulingkan pemerintahan Tsar Nikolas II dan mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov yang telah memimpin Rusia sejak abad ke-17. Ossetia Selatan adalah sebuah wilayah yang terletak pada bagian utara Georgia dan terpisahkan oleh pegunungan Kaukasus dengan Ossetia Utara yang merupakan bagian dari Rusia. Ossetia Selatan dihuni oleh etnis Ossetia yang secara etno-linguistik berbeda dengan etnis Georgia. Sejarahwan setempat mengklaim bahwa nenek moyang bangsa Ossetia menetap di wilayah tersebut sejak abad ke-5 Masehi dan membentuk negara Ossetia yang kemudian bergabung dengan Rusia pada tahun 1774.<sup>148</sup> Hal ini menjadi salah satu sumber friksi antara Rusia dan Georgia (dan antara Ossetia Selatan dan Georgia) karena rakyat Ossetia merasa lebih memiliki ikatan dengan Rusia ketimbang dengan Georgia.<sup>149</sup>

Pada saat Revolusi 1917 Georgia berada di bawah kekuasaan kelompok Menshevik yang berseberangan dengan kelompok Bolshevik di Moskow. Kelompok Menshevik memanfaatkan posisi Bolshevik yang masih lemah untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Georgia pada tanggal 26 Mei 1918, dengan demikian memisahkan diri dari Rusia. Sebagai akibatnya, Ossetia Selatan terpisah secara legal formal dari saudara-saudaranya di Ossetia Utara. Rakyat Ossetia Selatan merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh Georgia dan menyuarakan keinginannya untuk bergabung dengan Ossetia Utara, namun hal ini diinterpretasikan oleh Tbilisi sebagai dukungan terhadap kelompok

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, h. 188.

<sup>149</sup> *Ibid.*, h. 142.

Bolshevik.<sup>150</sup> Rasa saling curiga antara kedua belah pihak berubah menjadi insiden-insiden perlawanan terhadap pemerintah, dan pada tahun 1920 rakyat Ossetia Selatan yang didukung pasukan Bolshevik dari Ossetia Utara melancarkan pemberontakan besar yang berhasil dipadamkan secara brutal oleh tentara pemerintah.<sup>151</sup> Insiden ini menciptakan rasa permusuhan yang berkepanjangan antara Ossetia Selatan dan Georgia yang akan memanas-manaskan dirinya lagi dalam insiden-insiden serupa pada dekade 80-an dan 90-an serta pada awal abad ke-21.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemerdekaan Georgia tidak bertahan lama. Kelompok Bolshevik mengkonsolidasikan kekuatannya dan merebut Tbilisi dari tangan kelompok Menshevik pada bulan Februari 1921. Dalam traktat uni yang menjadi basis pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922, Ossetia Selatan mendapat status sebagai wilayah otonom (*autonomous oblast*) namun masih berada di bawah administrasi Georgia. Penetapan ini tidak diterima dengan baik oleh kedua belah pihak: rakyat Ossetia Selatan menuntut perlakuan yang sama dengan Ossetia Utara (yang memperoleh status yang lebih tinggi yaitu *autonomous republic* atau republik otonom) sementara rakyat Georgia merasa bahwa Ossetia Selatan adalah sebuah entitas asing yang pembentukannya tidak lain adalah implementasi dari politik *divide et impera* yang dilakukan Rusia terhadap Georgia.<sup>152</sup> Meskipun demikian hubungan Georgia-Ossetia Selatan melewati masa-masa Stalin, Krushchev dan Brezhnev tanpa mengalami gangguan yang berarti.

Barulah pada masa kepemimpinan Gorbachev hubungan ini menghadapi masalah yang serius. Insiden 9 April yang menyulut gejolak nasionalisme Georgia ternyata juga menyulut gejolak yang sama di Ossetia Selatan. Sebuah gerakan populer yang menyebut dirinya *Ademon Nykhas*<sup>153</sup> dibentuk pada tahun 1988 untuk menggalang persatuan rakyat demi mencapai kemerdekaan Ossetia Selatan. Selama musim semi dan musim panas 1989 Georgia dan Ossetia Selatan terlibat

---

<sup>150</sup> International Crisis Group, *Georgia: Avoiding War in South Ossetia* (Europe Report No. 159), Tbilisi/Brussels: ICG, 26 November 2004, h. 3.

<sup>151</sup> Cornell, *op. cit.*, h. 141.

<sup>152</sup> International Crisis Group, *loc. cit.*

<sup>153</sup> *Ademon Nykhas* adalah istilah dalam bahasa Ossetia yang secara harfiah berarti 'Popular Shrine' atau Tugu Peringatan Populer.

dalam sebuah ‘perang undang-undang’ yaitu ketika Tbilisi mengeluarkan peraturan yang mengukuhkan Georgia sebagai satu-satunya bahasa resmi di seluruh negara dan Tskhinvali membalas dengan mengeluarkan peraturan yang menetapkan Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah tersebut.<sup>154</sup> ‘Perang undang-undang’ ini berujung pada bentrokan-bentrokan etnis yang menyebabkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Setelah sekian lama dipendam pada akhirnya konflik antara keduanya tak terelakkan juga.

Tahap pertama dari konflik Georgia-Ossetia Selatan dimulai pada tanggal 23 November 1989 ketika Gamsakhurdia bersama dengan Gumbaridze memimpin sekitar 15.000 orang menuju Tskhinvali dengan alasan melindungi etnis Georgia di Ossetia Selatan.<sup>155</sup> Gerombolan ini berhasil ditahan di perbatasan Georgia-Ossetia Selatan oleh gabungan rakyat dan milisi Ossetia serta satu resimen tentara Soviet. Insiden ini mendorong *Ademon Nykhas* untuk mengirim petisi ke Moskow dengan tujuan penyatuan kembali Ossetia Selatan dengan Ossetia Utara. Isi petisi tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:

*It seems to us politically and economically absurd that within the framework of a democratic state the small Ossetian people should be divided into two administrative units; and we demand that the question of the unification of North and South Ossetia be examined at the [Communist Party of the Soviet Union] Central Committee Plenum on nationality questions.*<sup>156</sup>

Petisi ini tidak ditanggapi karena Moskow menghadapi masalah yang lebih besar. Memasuki tahun 1990, legitimasi dan otoritas Uni Soviet berada dalam ancaman yang serius dari perkembangan-perkembangan domestik dan eksternal. Di Georgia pun para elit politiknya sedang terlibat perselisihan mengenai masa depan negaranya sehingga selama paruh awal tahun 1990 hubungan Georgia-Ossetia Selatan kembali stabil. Namun demikian pada bulan Agustus ketegangan dalam hubungan tersebut kembali meningkat setelah parlemen Georgia mengeluarkan peraturan yang melarang partisipasi partai-partai daerah dalam pemilu legislatif yang akan dilangsungkan pada bulan Oktober. Peraturan ini

<sup>154</sup> Cornell, *Small Nations*, h. 153.

<sup>155</sup> *Ibid.*, h. 154.

<sup>156</sup> Dikutip dalam *ibid.*

secara efektif menutup kemungkinan bagi *Ademon Nykhas* atau organisasi daerah lainnya untuk memiliki suara di parlemen.<sup>157</sup>

Sebagai balasan atas peraturan ini Ossetia Selatan secara unilateral mengumumkan kenaikan statusnya dari *autonomous oblast* menjadi sebuah ‘Republik Demokratik Soviet Independen’ pada bulan September dan melakukan boikot terhadap pemilu legislatif. Dan pada tanggal 9 Desember 1990 Ossetia Selatan mengadakan pemilu sendiri dengan tujuan memilih anggota parlemen dari ‘republik’ baru ini. Dua hari kemudian parlemen ‘republik’ Ossetia Selatan memilih untuk berada di bawah otoritas Moskow; dengan kata lain, Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Georgia.<sup>158</sup> Tindakan ini direspon oleh Gamsakhurdia dengan membatalkan hasil pemilu tanggal 9, menghapus status *autonomous oblast* Ossetia Selatan dan menyatakan keadaan darurat di wilayah tersebut.<sup>159</sup> Gamsakhurdia kemudian memerintahkan blokade terhadap Ossetia Selatan dan secara definitif memulai perang Georgia-Ossetia Selatan ketika ia memerintahkan pasukannya untuk menduduki Tskhinvali pada bulan Januari 1991.<sup>160</sup>

Sepanjang tahun 1991 Tskhinvali praktis terbelah menjadi dua antara bagian kota yang dikuasai pasukan Georgia dan bagian yang dikuasai milisi Ossetia. Pasukan Georgia – yang sebagian besar terdiri dari kelompok-kelompok paramiliter yang beranggotakan penduduk Ossetia yang beretnis Georgia – menggunakan meriam artileri untuk mengebom Tskhinvali yang menyebabkan putusannya jalur komunikasi dan logistik.<sup>161</sup> Kedua belah pihak ditengarai terlibat dalam aksi-aksi brutal terhadap penduduk sipil dari etnis yang lain seperti pengusiran, penjarahan dan pemerkosaan.<sup>162</sup> Benar atau tidaknya dugaan itu tidak menutupi kenyataan bahwa perang ini memang menciptakan kondisi hidup yang sangat berat bagi penduduk sipil dari kedua belah pihak: sebanyak 40.000 hingga 100.000 orang menjadi pengungsi dan sebanyak 10.000 orang menjadi *internally*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*, h. 162.

<sup>159</sup> International Crisis Group, *loc. cit.*

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>162</sup> Cornell, *Small Nations*, h. 155; lihat juga *ibid.*



*displaced persons* (IDPs) akibat perang ini.<sup>163</sup> Pada bulan November pasukan Georgia berhasil mengepung Tskhinvali dan nyaris mengakhiri perang ini secara tuntas andai saja tidak terjadi kekisruhan internal yang melanda Georgia pada saat yang bersamaan.

Kekisruhan yang dimaksud ini terjadi akibat kepemimpinan presiden Gamsakhurdia yang semakin otoriter dan paranoid.<sup>164</sup> Hal ini menciptakan perpecahan antara Gamsakhurdia dengan sekutu-sekutunya seperti Tengiz Kitovani dan Jaba Ioselani. Kedua orang ini adalah pemimpin militer yang sedikit banyak ikut andil dalam perang dengan Ossetia Selatan: Kitovani adalah pemimpin Garda Nasional<sup>165</sup> dan Ioselani adalah pemimpin dari satuan paramiliter *Mkhedrioni* (Penunggang Kuda) yang terkenal karena ketangguhannya. Bergabungnya kedua orang ini ke pihak oposisi menyebabkan perpecahan ini meningkat menjadi perang saudara menjelang akhir tahun 1991.<sup>166</sup> Sepanjang bulan November dan Desember jalanan Tbilisi menjadi saksi pertumpahan darah antara tentara pemerintah dengan pasukan pemberontak pimpinan Kitovani dan Ioselani. Pada tanggal 22 Desember pihak pemberontak secara efektif menguasai Tbilisi dan memaksa Gamsakhurdia untuk meletakkan jabatannya dan meninggalkan Georgia; pada tanggal 6 Januari 1992 ia melarikan diri ke Armenia dan kemudian diberi suaka politik oleh presiden Djokhar Dudayev di Chechnya.

Bulan-bulan pertama tahun 1992 merupakan waktu yang sulit bagi Georgia; di satu sisi Uni Soviet sudah tidak lagi eksis namun di sisi lain Georgia berada dalam kondisi yang mendekati anarki. Para pemimpin pemberontak – Kitovani, Ioselani dan mantan perdana menteri Tengiz Sigua – membentuk sebuah Dewan Negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari namun tidak berhasil mengendalikan kelompok-kelompok paramiliter yang melakukan penjarahan terhadap penduduk sipil.<sup>167</sup> Kredibilitas dan legitimasi pemerintah berada pada titik yang sangat rendah sehingga Dewan Negara kemudian memutuskan untuk mengundang Eduard Shevardnadze untuk kembali ke Georgia

<sup>163</sup> International Crisis Group, *op. cit.*, h. 5.

<sup>164</sup> Cornell, *op. cit.*, h. 156.

<sup>165</sup> Garda Nasional adalah cikal bakal angkatan darat Georgia yang terbentuk dari sejumlah unit paramiliter.

<sup>166</sup> Cornell, *op. cit.*, h. 157.

<sup>167</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*, h. 166.

untuk memimpin kembali negara kelahirannya dan mengatasi situasi dalam negeri yang semakin memburuk.

Keputusan ini ternyata sangatlah tepat sebab setelah memangku jabatan ketua Dewan Negara pada bulan Maret, Shevardnadze menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang negarawan dengan melakukan kunjungan ke Tskhinvali untuk meredakan ketegangan antara Georgia dan Ossetia Selatan.<sup>168</sup> Suasana di Ossetia Selatan saat itu sebenarnya sudah berangsur-angsur membaik karena seperti yang telah disinggung sebelumnya perang saudara di Tbilisi menyebabkan berakhirnya pengepungan terhadap Tskhinvali dan penarikan mundur pasukan paramiliter yang kemudian digunakan untuk melawan Gamsakhurdia. Sayangnya Shevardnadze juga tidak lebih sukses dalam mengendalikan kelompok-kelompok paramiliter tersebut karena pada bulan April perang berkobar lagi di Ossetia Selatan setelah Tskhinvali kembali dihujani oleh tembakan meriam artileri dan paramiliter Georgia terlibat insiden pembantaian terhadap penduduk sipil Ossetia yang sedang mengungsi dari medan perang.<sup>169</sup>

Meskipun Rusia juga mengalami krisis domestik pada saat yang bersamaan dengan Georgia tidak berarti Moskow hanya berdiam diri dan membiarkan semua berjalan apa adanya. Rusia bahkan turut berperan dalam menentukan awal dan akhir dari perang antara Georgia dan Ossetia Selatan. Satu hal yang pasti adalah bahwa dari sudut pandang Georgia, Rusia adalah pihak ketiga yang selalu mencampuri urusan dalam negeri Georgia dan merupakan penyebab dari eskalasi konflik dengan Ossetia Selatan.<sup>170</sup> Sebelumnya telah disebutkan bahwa keterlibatan awal Rusia dalam konflik di Georgia adalah ketika sebuah resimen tentara Soviet membantu melindungi Tskhinvali dari ribuan pendukung Gamsakhurdia pada tahun 1989. Rusia kemudian juga secara tidak langsung terlibat dalam perang saudara tahun 1991: pasukan pemberontak yang menggulingkan Gamsakhurdia disinyalir memperoleh senjatanya dari pangkalan militer Soviet yang tersebar di wilayah Georgia.<sup>171</sup>

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 167.

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Cornell, *Small Nations*, h. 334.

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 336.

Intervensi Rusia menjadi lebih terbuka setelah eskalasi konflik pada bulan April dan Mei 1992. Politisi-politisi garis keras seperti ketua parlemen Rusia Ruslan Khasbulatov dan wakil presiden Aleksandr Rutskoi mengeluarkan pernyataan yang berisi kecaman keras terhadap tindakan Georgia dan penerimaan secara implisit terhadap keinginan Ossetia Selatan untuk bergabung dengan Rusia.<sup>172</sup> Memasuki bulan Juni kedua negara telah berada di ambang peperangan. Helikopter-helikopter Rusia melancarkan serangan terhadap tank dan ranpur milik Garda Nasional Georgia sementara satuan-satuan militer Rusia dan relawan dari republik-republik Kaukasus Rusia berhimpun di Ossetia Utara. Ossetia Utara juga mendukung saudara-saudaranya di selatan dengan menghentikan suplai gas alam dari Rusia ke Georgia dan melobi Moskow agar segera menggelar pasukan yang telah terhimpun.<sup>173</sup>

Shevardnadze dan presiden Rusia Boris Yeltsin menyadari bahwa perang yang awalnya merupakan konflik internal ini dapat meluas hingga ke tingkat regional; oleh sebab itu kedua pemimpin ini sepakat untuk meredakan ketegangan dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata di kota Sochi (Rusia) pada tanggal 22 Juni 1992 yang turut dihadiri oleh pemimpin Ossetia Utara dan Selatan. Perjanjian ini pada prinsipnya ‘membekukan’ konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan hingga waktu yang tidak ditentukan.<sup>174</sup> Untuk menjaga supaya gencatan senjata tetap bertahan kedua negara sepakat untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian (*Joint Peacekeeping Force* atau JPKF) yang terdiri dari personel Rusia, Georgia dan Ossetia (Utara dan Selatan). Pasukan ini mulai aktif pada bulan Juli dan melakukan patroli di zona konflik yaitu area dalam radius 15 km dari Tskhinvali (lihat gambar 2.1).

Perjanjian ini secara efektif mengakhiri perang di Ossetia Selatan tanpa deklarasi kemenangan salah satu pihak, namun pada kenyataannya Georgia merupakan pihak yang ‘kalah’ karena walaupun secara *de jure* Ossetia Selatan masih diakui sebagai bagian dari wilayah teritorial Georgia, secara *de facto* Ossetia Selatan telah melepaskan diri dari kontrol Tbilisi. Selain itu, Georgia harus menerima kehadiran personel militer Rusia – yang notabene memimpin

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 157.

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> Cornell, *Autonomy and Conflict*, h. 167.



### 2.2.3 Revolusi Mawar dan ‘Pencairan’ Konflik

Selama lebih dari 10 tahun Ossetia Selatan menikmati kemerdekaan *de facto*-nya dengan antara lain membentuk tatanan pemerintahan layaknya sebuah negara yang berdaulat. Konflik dengan Georgia tetap dalam keadaan ‘beku’ karena pemerintahan Eduard Shevardnadze lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi, stabilisasi politik internal dan rehabilitasi posisi internasional Georgia. Shevardnadze nyatanya berhasil mengubah Georgia dari kondisi semi-anarki pada awal pemerintahannya menjadi negara yang progresif dan semakin diperhitungkan dalam komunitas dunia.<sup>176</sup> Reputasi internasional Shevardnadze sebagai rekan Gorbachev dalam menerapkan *glasnost* dan *perestroika* pada masa Uni Soviet membuat dirinya sangat populer di Barat. Shevardnadze menggunakan popularitasnya tersebut untuk mendekati negaranya dengan Eropa dan Amerika dan menjauh dari pengaruh Rusia. Shevardnadze juga kerap melontarkan retorika pro-Barat dan anti-Soviet; hasilnya adalah status Georgia pada paruh akhir tahun 90-an sebagai penerima dana bantuan terbesar dari Amerika Serikat – dengan jumlah total USD 1 milyar selama masa pemerintahan Shevardnadze – untuk program-program demokratisasi dan pembangunan ekonomi.<sup>177</sup> Namun demikian di dalam negeri reputasi Shevardnadze adalah sebagai seorang pemimpin yang menunjukkan gejala-gejala otoritarianisme dan bertanggung jawab atas korupsi yang semakin merajalela. Partai politik Persatuan Warga Georgia (*Citizens’ Union of Georgia* atau CUG) yang dibentuknya pada tahun 1993 diduga melakukan kecurangan sehingga memungkinkan kemenangan mudah Shevardnadze dan CUG dalam pemilu presiden tahun 1995 dan 2000 dan pemilu legislatif tahun 1999.<sup>178</sup>

Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Shevardnadze menyebabkan menguatnya kelompok oposisi yang dimotori oleh Zurab Zhvania, Nino Burjanadze, dan Mikheil Saakashvili. Ketiga orang ini adalah pejabat dan mantan pejabat tinggi Georgia yang awalnya merupakan didikan Shevardnadze namun

<sup>176</sup> *Ibid.*, h. 342.

<sup>177</sup> Charles King, *The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus*, New York: Oxford University Press, 2008, h. 230.

<sup>178</sup> International Crisis Group, *Georgia: What Now?* (Europe Report No. 151), ICG: Tbilisi/Brussels, 3 Desember 2003, h. 3.

kemudian berseberangan pendapat dengan sang mentor.<sup>179</sup> Zhvania adalah ketua parlemen Georgia selama periode 1995-2001 dan Burjanadze menjadi anggota parlemen selama dua periode sebelum menggantikan posisi Zhvania sebagai ketua. Sementara itu Saakashvili adalah seorang pengacara dan mantan anggota CUG yang diangkat Shevardnadze sebagai menteri kehakiman pada tahun 2000 namun mengundurkan diri setahun kemudian.<sup>180</sup> Mereka kemudian membangun sebuah aliansi untuk melawan CUG yang disebut Gerakan Nasional Demokratik (*National Democratic Movement* atau NDM) dalam pemilu legislatif berikutnya yang diselenggarakan pada awal bulan November 2003.

Pemilu ini ternyata merupakan pengulangan terhadap yang sebelum-sebelumnya. Shevardnadze kembali dituduh melakukan kecurangan dan manipulasi pemilu yang kali ini dilakukan secara terang-terangan.<sup>181</sup> Hasil pemilu yang diumumkan pemerintah bertolak belakang dengan penghitungan yang dilakukan oleh pengamat independen asing maupun lokal yang menempatkan NDM sebagai pemenang.<sup>182</sup> NDM mengecam kecurangan tersebut dan menggalang massa pendukungnya untuk mengadakan protes terbuka. Selama 2 minggu berturut-turut jalanan kota Tbilisi dan halaman depan parlemen Georgia dipenuhi lautan manusia yang menuntut agar pemerintah mengakui kemenangan NDM. Ketika pada tanggal 22 November Shevardnadze membuka sesi parlemen yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu yang jelas-jelas curang itu, Saakashvili memimpin massa untuk menyerbu gedung parlemen dan menyebabkan Shevardnadze meninggalkan ruangan. Burjanadze mengumumkan ke seluruh negeri bahwa Shevardnadze telah secara efektif melepaskan jabatannya dan menyatakan dirinya sebagai kepala negara *ad interim*.<sup>183</sup> Keesokan harinya Shevardnadze dan para pemimpin NDM mengadakan pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov untuk mencari solusi damai bagi krisis ini. Hasil dari pertemuan itu adalah pengunduran diri Shevardnadze secara resmi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilu presiden pada bulan

---

<sup>179</sup> Svante E. Cornell, *Georgia after the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*, The Strategic Studies Institute, Februari 2007, h. 7.

<sup>180</sup> International Crisis Group, *op. cit.*, h. 6-7.

<sup>181</sup> *Ibid.*, h. 9.

<sup>182</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>183</sup> *Ibid.*, h. 11.

Januari 2004. Pemilu ini dimenangkan secara mutlak oleh Saakashvili dengan dukungan 96 persen dari total suara yang masuk; kemenangannya menjadi lebih lengkap setelah pemilu legislatif ulangan yang diselenggarakan pada bulan April dimenangkan NDM dengan dukungan 67 persen dari total suara yang masuk.<sup>184</sup>

Kudeta tak berdarah yang mengganti rezim Shevardnadze ini oleh media Barat dijuluki *Rose Revolution* atau ‘Revolusi Mawar’ karena tindakan para pengunjuk rasa yang membagi-bagikan bunga mawar kepada aparat keamanan yang menjaga gedung parlemen.<sup>185</sup> Saakashvili dipandang sebagai seorang reformis dan pejuang anti-korupsi yang mampu membawa perubahan bagi Georgia setelah 11 tahun berada di bawah pemerintahan Shevardnadze yang lemah dan korup. Saakashvili yang baru berusia 36 tahun saat terpilih menjadi presiden mengisi pemerintahannya dengan wajah-wajah muda yang mengesankan kepemimpinan yang dinamis dan penuh vitalitas.<sup>186</sup> Segera setelah memegang jabatan presiden, Saakashvili mendeklarasikan komitmennya untuk menjalankan reformasi di bidang ekonomi dan politik, membangun Georgia menjadi sebuah negara yang kuat dan demokratis, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Barat melalui keanggotaan dalam NATO dan Uni Eropa tanpa mengganggu hubungan bertetangga yang baik dengan Rusia.<sup>187</sup> Namun demikian Saakashvili juga menyatakan janjinya untuk mengembalikan keutuhan wilayah teritorial Georgia, sebuah pernyataan yang jelas-jelas ditujukan kepada Ossetia Selatan.<sup>188</sup>

Saakashvili tidak membuang waktu untuk mewujudkan janjinya tersebut. Pada bulan Mei 2004 Saakashvili memulai kampanye reintegrasi Ossetia Selatan dengan memerintahkan satuan-satuan kepolisian dan pasukan khusus (OMON) untuk melakukan operasi pemberantasan penyelundupan di Ossetia Selatan. Penyelundupan adalah masalah besar bagi Georgia karena kerugian yang disebabkan oleh pajak yang tidak terkumpul, namun bagi Ossetia Selatan yang tidak memiliki sistem perdagangan yang mapan, penyelundupan adalah cara yang

<sup>184</sup> International Crisis Group, *Georgia: Sliding towards Authoritarianism?* (Europe Report No. 189). Tblisi/Brussels: ICG, 19 Desember 2007, h. 1.

<sup>185</sup> King, *loc. cit.*

<sup>186</sup> *Ibid.*, h. 231.

<sup>187</sup> International Crisis Group, *loc. cit.*

<sup>188</sup> International Crisis Group, *Avoiding War*, h. 1.

paling efektif untuk memperoleh barang-barang kebutuhan hidup.<sup>189</sup> Pasukan Georgia disebar di zona konflik dan melakukan razia terhadap barang-barang ilegal serta menutup ‘pasar penyelundup’ di Ergneti (lihat gambar 2.1). Kehadiran pasukan yang bukan termasuk dalam komando JPKF ini menurut pemerintah dan penduduk Ossetia Selatan dipandang sebagai persiapan Georgia untuk ‘mencairkan’ konflik yang telah ‘beku’ selama 12 tahun.<sup>190</sup> Pasukan Georgia kembali terlibat bentrokan bersenjata dengan milisi Ossetia Selatan, dan pada bulan Juli dan Agustus bentrokan ini menjadi perang terbatas setelah kedua belah pihak saling bertukar tembakan senjata ringan dan mortir di zona konflik.<sup>191</sup>

Berbeda dengan perang 1991-1992, konflik kali ini berhasil dihentikan sebelum mengeskalasi terlalu jauh. Namun demikian berbeda pula dengan konflik yang lalu adalah bahwa Saakashvili mengangkat konflik ini ke tingkat internasional dengan menuduh Rusia sebagai dalangnya.<sup>192</sup> Pada bulan Juli Saakashvili menyatakan di hadapan pendukungnya bahwa “krisis di Ossetia Selatan bukanlah masalah antara Georgia dengan Ossetia [melainkan] masalah antara Georgia dengan Rusia.”<sup>193</sup> Rusia menolak tuduhan tersebut namun menyatakan “kekhawatirannya atas nasib penduduk Ossetia Selatan yang mayoritas merupakan warga Rusia.”<sup>194</sup> Sejak itu hubungan kedua negara mengalami keretakan yang permanen yang ditunjukkan oleh retorika-retorika antagonis yang saling dilontarkan oleh Saakashvili dan presiden Rusia Vladimir Putin serta tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan terhadap yang lain (*tit-for-tat*).

Tindakan-tindakan ini antara lain meliputi larangan impor produk-produk Georgia oleh Rusia pada bulan Desember 2005, penahanan empat orang perwira Rusia oleh Georgia dengan tuduhan spionase pada bulan September 2006 dan pelanggaran ruang udara Georgia oleh pesawat tempur Rusia pada bulan September 2007.<sup>195</sup> Situasi di Ossetia Selatan juga semakin memanas akibat

---

<sup>189</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>190</sup> Bertil Nygren, *The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Policy towards the CIS Countries*, London: Routledge, 2008, h. 145.

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 147.

<sup>192</sup> International Crisis Group, *op. cit.*, h. 16.

<sup>193</sup> Dikutip dalam *ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>195</sup> International Crisis Group, *Sliding towards Authoritarianism?*, h. 9.



bentrokan tiga arah yang melibatkan aparat keamanan Georgia, milisi Ossetia Selatan dan pasukan penjaga perdamaian Rusia. Situasi ini berlangsung hingga Saakashvili memutuskan untuk menyelesaikan masalah Ossetia Selatan untuk selamanya dengan memerintahkan serangan darat terhadap Tskhinvali pada tanggal 8 Agustus 2008 dini hari. Rusia rupanya telah mengantisipasi – atau mungkin memang memprovokasi – tindakan Georgia ini dan mengirim pasukan tempurnya melalui terowongan Roki yang menghubungkan Ossetia Utara dan Selatan.<sup>196</sup> Dengan tindakan ini maka mulailah intervensi militer pertama yang dilakukan Rusia setelah lepas dari Uni Soviet.

#### 2.2.4 Perang Dingin Baru?

Alasan resmi dari intervensi militer terhadap Georgia yang disampaikan oleh presiden Rusia Dmitry Medvedev – yang menggantikan Putin dalam pemilu bulan Maret 2008 – terdiri dari empat poin yaitu<sup>197</sup>:

- 1) Pemimpin-pemimpin Georgia bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan ilegal yang menimpa warga Ossetia Selatan selama 15 tahun terakhir;
- 2) Serangan terhadap warga dan personil militer Rusia yang ditempatkan di Ossetia Selatan sebagai penjaga perdamaian harus dibalas;
- 3) Pemimpin-pemimpin Georgia melancarkan serangannya untuk menuntaskan masalah Ossetia Selatan secara tuntas, dan Rusia memiliki kewajiban untuk mencegah agresi serta ‘genosida’ terhadap penduduk Ossetia Selatan.
- 4) Rusia bertindak untuk membela warganya yang diserang berdasarkan prinsip pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri (*self-defense*).

<sup>196</sup> International Crisis Group, *Russia vs Georgia: The Fallout* (Europe Report No. 195), Tbilisi/Brussels: ICG, 22 Agustus 2008, h. 1.

<sup>197</sup> Hans-Henning Schröder, “‘A Short, Victorious War?’ Russian Perspectives on the Caucasus Crisis”, dalam Hans-Henning Schröder (ed.), *The Caucasus Crisis: International Perceptions and Policy Implications for Germany and Europe*, SWP-Berlin Research Paper No. 9, November 2008, h. 7.

Sementara itu para pengamat Rusia dan media massa mengindikasikan bahwa paling sedikit ada empat alasan lain yang melatarbelakangi intervensi Rusia ini, yaitu<sup>198</sup>:

- 1) Rusia ingin menegaskan statusnya sebagai sebuah kekuatan besar (*Great Power*) yang memiliki hegemoni atas lingkaran pengaruhnya yaitu di *near abroad*;
- 2) Penetrasi Amerika Serikat ke dalam lingkaran pengaruh tersebut (dalam hal ini ditunjukkan dengan dukungan terhadap Revolusi Mawar serta bantuan militer AS ke Georgia) sebagai sebuah ancaman geopolitik yang berhasil dicegah oleh penggunaan kekuatan militer di Ossetia Selatan;
- 3) Georgia telah mempromosikan dirinya sebagai jalur transit minyak dan gas bumi yang melewati wilayah Rusia sehingga penggunaan kekuatan tersebut diharapkan akan membuat investor asing meragukan jaminan keamanan yang diberikan Georgia atau meninggalkan Georgia samasekali;
- 4) Intervensi di Ossetia Selatan merupakan ‘balasan’ Rusia atas tindakan serupa AS dan NATO di Kosovo pada tahun 1999 ketika negara-negara Barat tidak mengikutsertakan Rusia dalam proses-proses politik dan kemudian melakukan intervensi militer tanpa mempertimbangkan keberatan Rusia secara khusus maupun kepentingan Rusia secara umum.

Intervensi militer Rusia ini menciptakan perasaan *déjà vu* akan intervensi militer Soviet terhadap Hungaria, Cekoslowakia dan Afghanistan. Intervensi ini juga membangkitkan kembali kekhawatiran mengenai terjadinya sebuah ‘Perang Dingin Baru’, kali ini antara Rusia dengan Barat terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kekhawatiran ini dibantah antara lain oleh Richard Sakwa yang mengatakan bahwa bipolarisme dan konfrontasi ideologis yang menjadi ciri Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan bahwa sesungguhnya istilah ‘Perang Dingin’ adalah “metafora untuk sebuah hubungan yang pada dasarnya diwarnai ketegangan yang tidak bisa diselesaikan melalui kerangka cara pandang dunia yang dimiliki masing-masing

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

pihak namun melalui [sebuah proses] pemikiran ulang oleh keduanya.”<sup>199</sup> Terlepas dari ada tidaknya sebuah ‘Perang Dingin Baru’, kenyataannya adalah intervensi militer Rusia ini merupakan peristiwa penting dalam hubungan internasional kontemporer dan, seperti yang dikatakan Sakwa, menuntut dunia untuk memikirkan ulang pola-pola interaksi antar dan intranegara.



---

<sup>199</sup> Richard Sakwa, “‘New Cold War’ or twenty years’ crisis? Russia and international politics”, *International Affairs* 84:2 (2008), h. 266; terjemahan oleh penulis.